

LAPORAN AKHIR

Kajian Akademik Persiapan Pelaksanaan Penggabungan Kelurahan di Kota Surabaya



**BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

2013



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1.1

1.1. Latar Belakang	1.1
1.2. Dasar Hukum	1.3
1.3. Maksud dan Tujuan	1.3
1.4. Sasaran	1.3
1.5. Manfaat	1.4
1.6. Ruang Lingkup	1.4

BAB II KAJIAN PUSTAKA

	2.1
2.1. Pengertian Pemerintah Kelurahan	2.1
2.2. Pembentukan Kelurahan	2.2
2.3. Kebijakan Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan	2.12
2.4. Pelayanan Masyarakat	2.13
2.5. Penggabungan Kelurahan	2.15
2.5.1. Aspek Pembakuan Nama Baru	2.15
2.5.2. Aspek Material Asset	2.19
2.5.3. Aspek Sosial	2.19
2.5.4. Aspek Efektifitas Pelayanan	2.20
2.5.5. Aspek Efisiensi Anggaran	2.20
2.5.6. Aspek Hukum	2.21
2.5.7. Aspek Kelembagaan (Perubahan Struktur Organisasi)	2.22
2.6. Metode Skoring Penggabungan Kelurahan	2.22



BAB III METODOLOGI	3.1
3.1. Konsep	3.1
3.1.1. Syarat Penggabungan Kelurahan	3.1
3.2. Metodologi Pelaksanaan	3.3
3.3. Metode Pengumpulan Data	3.3
3.3.1. Data Primer	3.3
3.3.2. Data Sekunder	3.4
3.4. Teknik Focused Discussion Group (FGD)	3.4
3.5. Teknik Pemilihan Informan	3.5
3.6. Metode Pelaksanaan FGD	3.5
3.7. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan FGD	3.6
3.8. Lokasi Kegiatan	3.6
BAB IV KONDISI EKSTING	4.1
4.1. Kelurahan Kalianak dan Genting	4.1
4.1.1. Batas Wilayah Kelurahan	4.1
4.1.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana	4.4
4.1.3. Pelayanan Masyarakat	4.5
4.2. Kelurahan Greges dan Tambak Langon	4.6
4.2.1. Batas Wilayah Kelurahan	4.6
4.2.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana	4.8
4.2.3. Pelayanan Masyarakat	4.8
4.3. Kelurahan Prapen dan Panjang Jiwo	4.10
4.3.1. Batas Wilayah Kelurahan	4.10
4.3.2. Ketersediaan Sarana Prasarana	4.12
4.3.3. Pelayanan Masyarakat	4.13
4.4. Kelurahan Klakah Rejo dan Kandangan	4.14
4.4.1. Batas Wilayah Kelurahan	4.14
4.4.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana	4.15
4.4.3. Pelayanan Masyarakat	4.16

4.5. Kelurahan Sumberrejo dan Tambak Dono	4.17
4.5.1. Batas Wilayah Kelurahan	4.17
4.5.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana	4.18
4.5.3. Pelayanan Masyarakat	4.20
4.6. Kelurahan Sukolilo dan Komplek Kenjeran	4.21
4.6.1. Batas Wilayah Kelurahan	4.21
4.6.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana	4.23
4.6.3. Pelayanan Masyarakat	4.24
BAB V PENGABUNGAN KELURAHAN	5.1
5.1. Penentuan Kelurahan Yang Digabungkan	5.1
5.2. Penentuan Letak Kelurahan Baru dan Nama Kelurahan Baru	5.1
5.2.1. Kelurahan Sukolilo dan Komplek Kenjeran	5.2
5.2.2. Kelurahan Kalianak dan Genting	5.5
5.2.3. Kelurahan Tambak Langon dan Greges	5.7
5.2.4. Kelurahan Kandangan dan Klakah Rejo	5.8
5.2.5. Kelurahan Prapen dan Panjang Jiwo	5.10
5.2.6. Kelurahan Sumberrejo dan Tambak Dono	5.12
BAB VI PENUTUP	6.1
6.1. Penutup	6.1
6.2. Kesimpulan	6.1

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Batas Wilayah Kelurahan Kalianak dan Kelurahan Genting	4.1
Tabel 4.2	Tabel Kualitas Angkatan Kerja Penduduk Kelurahan Kalianak dan Kelurahan Genting	4.2
Tabel 4.3	Struktur Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Kalianak dan Kelurahan Genting	4.2
Tabel 4.4	Status Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Kalianak dan Kelurahan Genting	4.3
Tabel 4.5	Kualitas Angkatan Kerja Kelurahan Kalianak dan Kelurahan Genting	4.3
Tabel 4.6	Status Keluarga Sejahtera Kelurahan Kalianak dan Kelurahan Genting	4.4
Tabel 4.7	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalianak dan Kelurahan Genting	4.4
Tabel 4.8	Pelayanan Masyarakat Kelurahan Kalianak dan Kelurahan Genting	4.5
Tabel 4.9	Batas Wilayah Kelurahan Greges dan Kelurahan Tambak Langon	4.6
Tabel 4.10	Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Tambak Langon dan Greges	4.7
Tabel 4.11	Struktur Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Tambak Langon dan Kelurahan Greges	4.7
Tabel 4.13	Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tambak Langon dan Kelurahan Greges	4.9
Tabel 4.14	Batas Wilayah Kelurahan Prapen dan Panjang Jiwo	4.10
Tabel 4.15	Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Prapen dan Kelurahan Panjang Jiwo	4.10
Tabel 4.16	Status Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Prapen dan Kelurahan Panjang Jiwo	4.11

Tabel 4.17	Ketersediaan Sarana Kesehatan Kelurahan Prapen dan Kelurahan Panjang Jiwo	4.12
Tabel 4.18	Prasarana Ekonomi Kelurahan Prapen dan Kelurahan Panjang Jiwo	4.12
Tabel 4.19	Pelayanan masyarakat Kelurahan Prapen dan Panjang Jiwo	4.13
Tabel 4.20	Batas Wilayah Kelurahan Klakah rejo dan Kelurahan Kandangan	4.14
Tabel 4.21	Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Klakah Rejo dan Kelurahan Kandangan	4.14
Tabel 4.22	Sarana Pendidikan Kelurahan Klakah Rejo dan Kelurahan Kandangan	4.15
Tabel 4.23	Sarana Kesehatan Kelurahan Klakah Rejo dan Kelurahan Kandangan	4.15
Tabel 4.24	Prasarana Ekonomi Kelurahan Klakah Rejo dan Kelurahan Kandangan	4.16
Tabel 4.25	Pelayanan Masyarakat Kelurahan Klakah Rejo dan Kelurahan Kandangan	4.16
Tabel 4.26	Batas Wilayah Kelurahan Tambak Dono dan Kelurahan Sumberrejo	4.17
Tabel 4.27	Status Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Tambak Dono dan Kelurahan Sumberrejo	4.18
Tabel 4.28	Sarana Pendidikan Kelurahan Tambak Dono dan Sumberrejo	4.19
Tabel 4.29	Sarana Kesehatan Kelurahan Tambak Dono dan Kelurahan Sumberrejo	4.19
Tabel 4.30	Prasarana Ekonomi Kelurahan Tambak Dono dan Kelurahan Sumberrejo	4.19
Tabel 4.31	Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tambak Dono dan Sumberrejo	4.20
Tabel 4.32	Batas Wilayah Kelurahan Sukolilo dan Komplek Kenjeran	4.21
Tabel 4.33	Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Sukolilo dan Kelurahan Komplek Kenjeran	4.22
Tabel 4.34	Kualitas Angkatan Kerja Kelurahan Sukolilo dan Kelurahan Komplek Kenjeran	4.22
Tabel 4.35	Sarana Pendidikan Kelurahan Sukolilo dan Kelurahan Komplek Kenjeran	4.23
Tabel 4.36	Prasarana Ekonomi Kelurahan Sukolilo dan Kelurahan Komplek Kenjeran	4.23

Tabel 4.37	Pelayanan Masyarakat Kelurahan Sukolilo dan Kelurahan Komplek Kenjeran	4.24
Tabel 5.1	Kondisi Eksisting Kelurahan Sukolilo dan Komplek Kenjeran	5.2
Tabel 5.2	Kondisi Eksisting Kelurahan Kalianak dan Genting	5.5
Tabel 5.3	Kondisi Eksisting Kelurahan Tambak Langon dan Greges	5.7
Tabel 5.4	Kondisi Eksisting Kelurahan Kandangan dan Klakah Rejo	5.8
Tabel 5.5	Kondisi Eksisting Kelurahan Prapen dan Panjang Jiwo	5.10
Tabel 5.6	Kondisi Eksisting Kelurahan Sumberrejo dan Tambak Dono	5.12

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi Daerah yang sedang berlangsung saat ini merupakan suatu hal yang baru bagi setiap daerah di Indonesia, oleh karena otonomi yang dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut lebih memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri. Hal tersebut tentunya mengembalikan masyarakat daerah kepada penemuan dirinya masing-masing dengan ciri dan kemampuannya masing-masing, setelah terbelenggu dengan penyeragaman yang selama ini terjadi oleh rezim yang ada.

J. Kaloh (2002) menyatakan, pada dasarnya di era otonomi daerah fungsi pemerintahan meliputi tiga hal yaitu pelayanan kepada masyarakat (service); membuat pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (regulation); dan pemberdayaan (empowering). Selanjutnya Sadu Wasistiono (2000) menyatakan salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, oleh karena itu organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai "pelayanan masyarakat" (public service).

Otonomi Daerah yang sarat dengan isu strategi berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah merupakan sebuah tantangan bagi Kelurahan untuk menanggapi serta mensiasatinya dengan tanggap dan cepat agar tidak ketinggalan dari kelurahankelurahan lainnya dalam memacu gerak pembangunan.



Dengan demikian diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari bagian organisasi demi optimalisasi bidang tugas yang diembannya. Kinerja suatu organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipikul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal.

Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas yang diemban.

Kelurahan adalah suatu instansi pemerintah terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal memberikan jasa pelayanan administrasi kependudukan. Kesibukan dan rutinitas masyarakat yang sangat tinggi menyebabkan masyarakat sangat mengharapkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat dan efisien. Kelurahan saat ini melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat dimulai dari pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berbagai macam surat keterangan.

Sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia, sebagai bagian dari sistem pemerintahan, kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelurahan hanya bisa dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah ibukota kabupaten/kota dan kecamatan. Pembentukan kelurahan tersebut dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.

Berdasarkan kondisi di atas yang menjadi latar belakang kajian ini, maka penggabungan kelurahan di Kota Surabaya dilakukan guna efisiensi anggaran, agar anggaran pembangunan bisa semakin diperbesar dan pada gilirannya semakin mensejahterakan warga.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penggabungan wilayah kelurahan dalam kaitannya dengan efisiensi anggaran di Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Kelurahan.
- b. Instruksi Walikota Surabaya Nomor Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemekaran Dan Penggabungan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dilaksanakan kegiatan Penggabungan Kelurahan terhadap unit-unit pelayanan publik khususnya kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai upaya efisiensi anggaran belanja pegawai dengan mengedepankan target pelayanan publik tetap maksimal.
- b. Adapun tujuan Pembentukan Kelurahan di Kota Surabaya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

1.4. Sasaran

Secara khusus sasaran yang ingin dicapai melalui Penggabungan Kelurahan terhadap unit-unit pelayanan publik khususnya di lingkup kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah :

- a. Mengetahui dan mengevaluasi tingkat kinerja unit pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Surabaya;
- b. Mendorong tumbuhnya inovasi untuk penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan lebih berdayaguna dan berhasil guna;

1.5. Manfaat

Manfaat Penggabungan Kelurahan terhadap unit-unit pelayanan publik khususnya kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, adalah untuk:

- a. Meningkatkan kemampuan pemerintahan kelurahan dalam rangka penyelenggaraan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kapasitas yang memadai ataupun kewenangan penuh kepada pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti : pembuatan KTP, surat tanah, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Pengelolaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah kelurahan. Dengan demikian pemerintah kelurahan akan paham akan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kemampuan pemerintah kelurahan dalam menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan ekonomi rakyat, perlindungan hukum dan perlindungan lingkungan hidup dan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menilai kinerja pemerintah kelurahan dan perangkatnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penggabungan Kelurahan terhadap unit-unit pelayanan publik di kota Surabaya antara lain :

No.	Kecamatan/Kelurahan
1.	TENGILIS MEJOYO
	Kelurahan Prapen
	Kelurahan Panjang Jiwo
2.	BENOWO
	Kelurahan Kandangan
	Kelurahan Klakah Rejo

3.	BULAK
	Kelurahan Sukolilo
	Kelurahan Komplek Kenjeran
4.	ASEMROWO
	a. Kelurahan Genting
	Kelurahan Kalianak
	b. Kelurahan Greges
	Kelurahan Tambak Langon
5.	PAKAL
	Kelurahan Sumberrejo
	Kelurahan Tambak Dono

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pemerintah Kelurahan

Menurut pasal 1 : 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Dalam kamus bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh Poerwadarminta (1998:615) mendefinisikan bahwa Kelurahan adalah daerah (kantor,rumah) Lurah. Sementara itu dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa :

- a. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- b. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- c. Lurah diangkat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- d. Syarat-syarat lurah meliputi :
 - Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
 - Masa kerja minimal 10 tahun.
 - Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah Kecamatan didaerah Kabupaten/Kota, dapat berfungsi sebaga unit kerja pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat kepada Lurah. Sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah kelurahan menyelenggarakan

sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan Camat.

Pemerintah kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan masyarakat diwilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah dibawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat; seperti pelayanan pembuatan KTP, pencatatan akta tanah, pelayanan kesehatan, penyuluhan masyarakat, tata pembagian air untuk pertanian (irigasi) dan sebagainya.

Pembentukan kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah melalui analisis potensi daerah, beban kerja daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, responsivitas, fleksibilitas, rasionalitas, rentang kendali dan akuntabilitas.

2.2. Pembentukan Kelurahan

A. Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan

Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dilakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan harus diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati atau Walikota dan usul Lurah tersebut dimintakan persetujuan kepada DPRD dan setelah disetujui oleh DPRD, maka Bupati/Walikota menerbitkan peraturan daerah mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan.

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 tahun 2005, tentang pembentukan daerah Kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan dibentuk diwilayah kecamatan.
- b. Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan dari beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran kelurahan dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.
- c. Pembentukan kelurahan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan :
 1. Jumlah penduduk.
 2. Luas wilayah.
 3. Bagian wilayah kerja
 4. Sarana dan prasarana pemerintahan.
- d. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.
- e. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

B. Tujuan Pembentukan

Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

Pembentukan kelurahan-kelurahan baru terutama dikota-kota dimana desa-desa yang telah ada sebelumnya sudah kurang selaras dan serasi dengan perkembangan masyarakatnya yang telah nyata mempunyai ciri dan sifat "masyarakat kota/urban". Sebagai contoh desa-desa yang berada dikota kecamatan yang telah sedemikian rupa berkembang karena banyaknya industri dengan menggunakan teknologi tinggi dikawasan kecamatan tersebut, atau karena menjadi "simpul" lalu lintas perdagangan yang cukup padat dan lain sebagainya.

C. Syarat-Syarat Pembentukan Kelurahan

- a. Faktor penduduk; sekurang-kurangnya 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga, dan sebanyak-banyaknya 20000 jiwa atau 4000 Kepala Keluarga.
- b. Faktor luas wilayah; harus dapat terjangkau secara efektif dalam melaksanakan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- c. Faktor letak; berkaitan dengan aspek komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat pengembangan harus sedemikian rupa, sehingga memudahkan pemberian pelayanan masyarakat.
- d. Faktor prasarana; berkaitan dengan prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan fisik pemerintah akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sebagaimana layaknya.
- e. Faktor sosial budaya, agama dan adat akan dapat berkembang dengan baik.
- f. Faktor kehidupan masyarakat; baik mata pencarian dan ciri-ciri kehidupan lainnya akan dapat meningkat menjadi lebih baik.

D. Yang Berwenang di Kelurahan

Usul pembentukan kelurahan dibuat oleh Bupati/Walikota setelah mendengarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II bersangkutan, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, untuk seterusnya oleh Gubernur akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, maka Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Kelurahan yang diusulkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat-perangkat kelurahan. Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi jabatan serta jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada lurah. Perangkat kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat.

E. Struktur Organisasi di Kelurahan

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :

- a. Kepala Kelurahan
- b. Sekretaris Kelurahan
- c. Kepala-kepala urusan, minimal 3 dan maksimal 5.
- d. Kepala-kepala lingkungan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Kepala urusan minimal 3, yaitu :

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan
- c. Urusan Keuangan dan Urusan Umum

Kepala urusan maksimal 5, yaitu :

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perekonomian dan pembangunan
- c. Urusan Kesejahteraan rakyat
- d. Urusan Keuangan
- e. Urusan Umum

Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan didapat dari susunan sebagai berikut :

a. Lurah sebagai Kepala Kelurahan

Kepala kelurahan berada dibawah Camat serta bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, urusan pemerintah umum, termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban.

Sebagai tugas utama dari kantor kelurahan yang pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service) dan juga merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan kelurahan serta melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan program pembangunan di kelurahan. Dalam penelitian ini, penulis menyoroti tentang pemberdayaan pemerintah kelurahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Kepala Kelurahan (Lurah), yaitu :

1. Sebagai alat pemerintah yang berada langsung dibawah Camat.
2. Melaksanakan tugas-tugas dari pemerintah atas (pusat).
3. Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati/Walikota melalui perantara Camat.
4. Bertugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bertugas sebagai pembina ketentraman dan ketertiban dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum.
5. Berfungsi menggerakkan partisipasi masyarakat, melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya; melaksanakan tanggungjawabnya dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan.
6. Melaksanakan pembinaan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Sekretaris Kelurahan memiliki tugas :

1. Melakukan administrasi kepegawaian.
2. Melakukan administrasi keuangan.
3. Melakukan urusan perlengkapan dan inventarisasi kantor kelurahan.
4. Melakukan urusan rumah tangga.
5. Melakukan penyelenggaraan rapat-rapat dasar dan upacara.
6. Melakukan urusan tata usaha kelurahan.
7. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris kelurahan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada lurah. Setiap seksi yang ada dikelurahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada lurah.

Kepala Urusan Pemerintahan memiliki tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan.
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pendirian wilayah dan masyarakat.
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan.
- d. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU).
- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.

Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban memiliki tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang keamanan dan ketertiban.
- b. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil.
- c. Membantu pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana yang lainnya.
- d. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan beragama.
- e. Mengumpulkan dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban.

Kepala Urusan Pembangunan memiliki tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan.
- b. Melakukan pembinaan terhadap kegiatan perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.
- c. Melakukan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan.

- d. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan melaksanakan program-program pembangunan.
- e. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik yang terdapat di kelurahan.
- f. Membantu, memelihara serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah lembaga masyarakat kelurahan.
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat memiliki tugas :

- a. Melakukan pembinaan dalam kegiatan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
- b. Melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap kerukunan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan/dana terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya.
- d. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang lainnya.
- e. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, sedekah.
- f. Membantu kegiatan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI).
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat.

Kepala Lingkungan memiliki fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan tugas lurah dalam wilayah kerjanya.
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program-program pemerintah kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

- d. Membantu lurah dalam membina dan mengkoordinasi RT/RW diwilayah kerjanya.
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas lurah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsionalis senior yang telah ditunjuk. Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Serta jumlah tenaga fungsional juga ditentukan berdasarkan jenis dan beban kerja. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada kantor kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun dalam satuan unit organisasi dilingkungan Kabupaten/Kota serta dengan instansi lain diluar instansi Pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan bulanan tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dari bawahannya masing-masing, wajib diolah dan disusun sebagai bahan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Beberapa contoh Pelayanan Masyarakat yang dapat dilakukan di Kelurahan di Kota Surabaya yaitu :

- KARTU KELUARGA (KK) adalah Kartu yang memuat data tentang Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.

PERSYARATAN :

1. Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan.

2. Kartu Keluarga Asli yang lama atau Surat Ijin menetap yang habis masa berlakunya.
3. Fotocopy Akta Perkawinan.
4. Fotocopy Akta Perceraian.
5. Fotocopy Akta Kelahiran.
6. Fotocopy Akta Pengangkatan Anak bagi Anak Angkat.
7. Fotocopy Surat Ganti Nama (WNI) Turunan Asing.
8. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi WNA.
9. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA.
10. Mengisi Formulir Permohonan KK model FS.01 dan Formulir Bio Data model FS.02 untuk Bio Data semua anggota keluarga.

Syarat no 3 sampai 7 harus dilegalisir. Berlaku sepanjang tidak ada perubahan (mutasi).

- KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) adalah Sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap Penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

PERSYARATAN :

1. Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan.
2. Kartu Keluarga Asli.
3. Pasphoto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 = 2 lembar.
4. KTP yang habis masa berlakunya bagi perpanjangan KTP.
5. KTP yang rusak untuk penggantian KTP yang baru.
6. Surat Keterangan dari Kepolisian untuk penggantian KTP hilang.
7. Mengisi formulir KTP model FS.03

MASA BERLAKU : 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

- AKTE KELAHIRAN adalah Akta Kelahiran yang pendaftarannya tidak melebihi jangka waktu 60 hari kerja sejak anak dilahirkan

PERSYARATAN :

1. Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit, Klinik tempat kelahiran anak.

2. Surat Nikah, Akta Perkawinan Catatan Sipil orang tua anak yang dilahirkan.
3. KTP / KRT.
4. SBKRI bagi WNI Turunan.
5. Akta Lahir ibu si anak bagi anak luar kawin.
6. Surat-surat Asing bagi WNA dan SKBRI (bagi WNI Turunan).

F. Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Sebagai satuan dari pemerintahan wilayah, maka pemerintah kelurahan diwajibkan melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan yang hendak dicapai adalah peningkatan dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kelurahan sehingga benar-benar berdaya guna dan berhasil guna, selaras dan serasi dengan perkembangan pemerintahan dan lajunya pembangunan nasional.

Beberapa macam kegiatan administrasi pemerintahan di kelurahan yang wajib dilaksanakan dengan tertib, terdiri atas :

1. Administrasi Umum

Administrasi umum adalah segala kegiatan-kegiatan pencatatan data mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah desa dan pemerintah kelurahan pada buku administrasi umum.

Buku administrasi umum terdiri atas :

- a. Buku keputusan desa (untuk kelurahan tidak perlu).
- b. Buku keputusan kepala desa (untuk kelurahan menjadi buku keputusan kepala kelurahan).
- c. Buku kekayaan desa (kelurahan tidak punya kekayaan, jadi untuk kelurahan adalah buku inventaris kelurahan).
- d. Buku agenda.
- e. Buku ekspedisi
- f. Buku tanah-tanah di Kelurahan.

2. Administrasi Penduduk

Sebagaimana tentang permasalahan administrasi umum yang telah terurai diatas, maka desa dan kelurahan diwajibkan memiliki administrasi khusus sebagai sarana demi lancarnya berbagai program pembangunan, diantaranya program kependudukan yang banyak memiliki kaitan dengan program-program pembangunan lainnya secara nasional.

Buku administrasi penduduk terdiri atas :

- a. Buku Induk Penduduk.
- b. Buku penduduk sementara.
- d. Buku perubahan penduduk.
- e. Buku perkembangan penduduk.
- f. Buku Kartu Keluarga
- g. Buku Kartu Tanda Penduduk
- h. Buku jumlah penduduk

Sebagaimana halnya dengan pengisian buku administrasi umum, maka dalam pengisian buku administrasi penduduk harus dipertanggungjawabkan sekretaris kelurahan. Setiap 3 bulan sekali pemerintah kelurahan wajib melaporkan perkembangan penduduk dan kutipan buku jumlah penduduk yang dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang bersangkutan.

2.3. Kebijakan Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan

Kebijakan yang dapat ditempuh dalam rangka pemberdayaan pemerintahan kelurahan adalah :

1. Mengembangkan kemandirian kelembagaan pemerintahan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan lembaga yang lainnya.
2. Meningkatkan pola pengembangan kelurahan, tingkat pengembangan kelurahan dan pembentukan kelurahan baru.

3. Meningkatkan pola penataan kewenangan kelurahan dan pembagian wilayah kelurahan, pusat pertumbuhan dan wilayah berkembang, pendataan penduduk dan monografi.
4. Mengembangkan peranan lembaga masyarakat.
5. Menguatkan dan meningkatkan kerjasama antar desa atau kelurahan.
6. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan dan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
7. Perumusan kebijakan fasilitas pemberian tunjangan pendapatan dan tabungan asuransi bagi aparatur pemerintah kelurahan.
8. Perumusan kebijakan fasilitas pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah kelurahan.
9. Meningkatkan kapasitas sumber pendapatan untuk kepentingan daerah dalam menggali potensi kekayaan daerah.
10. Meningkatkan pemanfaatan dana pinjaman dan sumbangan dari pihak ketiga bagi kepentingan pembangunan di daerah kelurahan, pemanfaatan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD), pendayagunaan dana kas, bangunan kelurahan dan objek rekreasi di kelurahan bagi peningkatan pendapatan dan kekayaan daerahnya.
11. Pengelolaan pengaturan daerah tingkat Kabupaten/Kota mengenai pengaturan kelurahan dan pembentukan paguyuban pemerintahan kelurah. Perumusan fasilitas kebijakan pembagian dana perimbangan Kabupaten/Kota ke kelurahan dan tugas pembantuan ke kelurahan.

2.4. Pelayanan Masyarakat

Secara umum kita telah mengetahui masalah-masalah yang dihadapi di kelurahan, baik yang bersumber secara internal maupun yang eksternal, seperti semakin pesatnya kegiatan pembangunan yang hasil-hasilnya telah kita rasakan saat ini. Namun demikian masih dapat ditemukan pula dampak yang dapat menimbulkan masalah yang baru. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan kemampuan di bidang perencanaan pembangunan dan pemberian pelayanan yang baik dan

berkualitas oleh para aparatur kelurahan kepada masyarakat sehingga permasalahan yang kompleks dan rumit dapat diatasi. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selama ini masih memiliki beberapa kelemahan :

- a. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
- b. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
- c. Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut.
- d. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya kurang berkoordinasi. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.
- e. Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama.
- f. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.
- g. Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan .

Sehubungan dengan itu, maka lurah dan perangkatnya serta pimpinan lembaga yang ada di kelurahan harus mampu menyusun rancangan pembangunan daerahnya yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

Dengan kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya, maka lurah dan perangkat kelurahan, serta pimpinan lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan memiliki suatu kemampuan untuk menyusun rencana atau program kerja yang secara teknis dapat dilaksanakan, ekonomis dan menguntungkan serta politis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara karakteristik pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah sebagian besar masih hak monopoli dari pemerintah tersebut sehingga tidak terdapat suatu persaingan yang baik dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadikan lemahnya pengelolaan dan penyediaan pelayanan yang berkualitas. Lebih buruk lagi kondisi ini menjadikan para aparatur pemerintahan sebagai pengelola dan pemberi pelayanan memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi, dan cenderung mempersulit prosedur pelayanannya. Akibat permasalahan tersebut, citra buruk pada pengelolaan pelayanan publik masih melekat sampai saat ini sehingga tidak ada kepercayaan masyarakat pada pengelolaan pelayanan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Kenyataan ini merupakan tantangan yang harus segera diatasi terlebih pada era persaingan bebas pada saat ini. Profesionalitas pelayanan kepada masyarakat dan pengembalian kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus diwujudkan.

2.5. Penggabungan Kelurahan

Selain dapat dimekarkan, sebuah kelurahan juga dapat dihapus dan digabung jika kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan. Penghapusan dan penggabungan tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pembentukan, penghapusan atau penggabungan kelurahan terdiri dari beberapa aspek, antara lain :

2.5.1. Aspek Pembakuan Nama Baru

a. Memperhatikan Toponimi (Sejarah Nama)

Penamaan daerah, tempat atau jalan yang dikenal sebagai toponim, sudah dikenal masyarakat sejak awal keberadaannya. Kata toponim berasal dari bahasa Yunani topos dan nomos. Topos berarti tempat, sedangkan nomos

berarti nama. Jadi pengertian toponim adalah nama suatu tempat. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian toponim tidak hanya pada nama suatu tempat tetapi lebih luas yaitu pada upaya untuk mencari asal-usul, arti, penggunaan, dan tipologi nama suatu tempat/daerah.

Kajian tentang toponim sangat erat dengan kajian sejarah. Latar belakang penamaan suatu tempat/daerah tentu tidak lepas dari proses menemukan hal-hal yang khas yang dapat menjadi identitas suatu tempat/daerah. Toponim mampu memberikan gambaran mengenai latar belakang dinamika masyarakat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang ingin diabadikan atau diingat oleh masyarakat. Pelacakan toponim tempat /daerah mempunyai peran dalam menelusur latar belakang kesejarahan dan aktivitas atau kondisi awal saat tempat/daerah itu terbentuk.

Lokasi atau tempat adalah suatu obyek yang termasuk dalam unsur geografis. Pengertian dari unsur geografis adalah suatu obyek (features) yang dapat diidentifikasi yang terdapat di bumi. Unsur geografis ini sendiri bisa dikategorikan dalam dua bagian besar yaitu unsur alam yang meliputi segala unsur di daratan dan di perairan, misalnya gunung, sungai, teluk; dan unsur buatan misalnya unsur pemukiman dan non-pemukiman. Unsur pemukiman misalnya desa, kampung dan kota, sedangkan kawasan perkebunan, bandara, jembatan adalah contoh dari unsur non-pemukiman.

Hal yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi unsur geografis tersebut adalah dengan memberikan 'nama' yang berfungsi sebagai unit pengenalan. Nama pada unsur geografis juga dapat menggambarkan suatu 'sejarah peradaban' yang terkandung padanya. Misalnya nama Kota Surabaya, yang berasal dari sebuah legenda akan pertarungan antara ikan hiu (sura) dan buaya. Kemudian satu lokasi di Sumatera Selatan yang bernama Prabumulih, tentu mempunyai makna sejarah yang menarik untuk diketahui. Juga nama Irian (yang sekarang sebagian wilayahnya diubah menjadi Papua) menurut ahli sejarah berasal dari

singkatan 'Tkut Republik Indonesia Anti Netherland' melambangkan dinamika proses perjuangan bangsa Indonesia pada awal tahun 1960-an.

b. Memperhatikan Kaidah Bahasa

Kaidah penulisan nama geografis secara umum mengikuti kaidah penulisan yang baku dalam bahasa Indonesia. Secara umum, ada dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu kaidah penulisan yang berkaitan dengan nama generik dan nama spesifik; dan kaidah penulisan yang berkaitan dengan transformasi dari bahasa daerah dan asing ke bahasa Indonesia. Kaidah penulisan nama geografis yang berkaitan dengan nama generik dan nama spesifik adalah selalu ditulis secara terpisah dan dalam huruf kapital. Sebagai contoh adalah penulisan Sungai Saddang (sebuah sungai di Sulawesi Selatan), sungai adalah nama generik, sedang Saddang adalah nama dari sungai tersebut.

Apabila suatu nama tempat, misalnya kota, dimulai dengan nama generik yang bukan nama tempat, maka ditulis sebagai satu kata, misalnya Bandarlampung dan Tanjungpinang. Nama spesifik ditulis sebagai satu kata apabila terdiri dari: pengulangan kata (misalnya Bagansiapiapi); terdiri dari 2 kata benda (misalnya Pagaralam); terdiri dari kata benda diikuti nama generik (misalnya Pagargunung); terdiri dari 3 kata, masing-masing 2 nama generik diikuti dengan kata sifat atau kata benda (misalnya: Muarabatangankola, muara dan batang adalah nama generik dari unsur hidrografis dan angkola adalah nama benda); terdiri dari 4 kata atau lebih (misalnya Purbasinombamandalasena). Tetapi apabila suatu nama spesifik itu diikuti dengan kata sifat, bilangan atau penunjuk arah, maka ditulis terpisah, misalnya Kalimantan Tengah, Koto Ampek (ampek adalah empat dalam bahasa Minang).

Bahasa daerah merupakan salah satu faktor penting dalam tata cara penulisan nama unsur geografis. Hal ini berkaitan dengan arti dari 'istilah' bahasa daerah tersebut yang mungkin tidak diketahui secara umum. Tentu saja ini merupakan tantangan bagi setiap 'pemilik' istilah tersebut untuk mensosialisasikan sehingga bisa terwujud 'saling pengertian' dalam bangsa yang besar ini. Istilah bahasa

daerah tersebut bisa dijumpai dalam nama generik maupun nama spesifik. Misalnya untuk nama generik, beragam istilah digunakan dari Sabang sampai Merauke untuk mendeskripsikan sungai, misalnya krueng atau ie (Aceh), ci (Sunda), bengawan atau kali (Jawa), batang atau way (daerah Sumatera), je'ne dan salo (daerah Sulawesi).

c. Memperhatikan Pendapat Ahli dan Masukan Masyarakat

Professional adjustment merupakan pendapat/rekomendasi para ahli atau masukan tokoh masyarakat serta sumber-sumber sejarah, yang mendukung laik tidaknya "nama" yang berfungsi sebagai unit pengenalan. Professional Adjustment dapat diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang bisa diambil bisa berupa peta-peta kuno, peta kawasan-kawasan pemukiman kuno, dokumen dan arsip, artefak, monumen dan bangunan-bangunan yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan kawasan di Kota Surabaya. Selain itu sumber primer juga bisa diperoleh melalui pengamatan dan survey di lapangan. Sumber-sumber sejarah dilacak melalui Arsip Nasional R.I, Perpustakaan Nasional R.I, Badan Arsip dan perpustakaan daerah, dan lain sebagainya. Sumber sekunder diperoleh dari koran, artikel, literatur-literatur yang ditulis oleh ahli-ahli sejarah dan sebagainya. Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat biasa yang mengetahui dan memahami perkembangan kawasan, menjadi pendukung dari sumber-sumber tertulis yang berhasil diperoleh.

Tahap kedua adalah melakukan kritik atau penilaian terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh. Kritik ekstern untuk menguji tingkat otentisitas sumber dan kritik intern untuk menguji kredibilitas informasi yang terkandung di dalamnya. Interpretasi dilakukan untuk menafsirkan masing-masing data dan kemudian disusun dan dihubungkan satu data/informasi dengan data/informasi yang lain. Fakta-fakta yang muncul kemudian dihubungkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang perkembangan kawasan.

Tahap akhir yaitu menyusun dan menuliskan fakta-fakta sejarah yang bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian sejarah digunakan dengan tujuan agar dapat melihat secara lebih jelas proses pembentukan, perkembangan, dinamika, perubahan serta alur sejarah kawasan kelurahan melalui kajian toponim.

2.5.2. Aspek Material Asset

Berdasarkan regulasi yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, aset wilayah yang akan digabung berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya wajib diserahkan seluruhnya kepada calon wilayah baru, sedangkan aset yang bergerak dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon wilayah baru. Penyerahan aset harus disertai dengan dokumen, yakni bukti kepemilikan aset. Segala hal terkait dengan aset ini dikoordinasikan dalam Tim Penggabungan Kelurahan

2.5.3. Aspek Sosial

1. Perlunya memperhatikan kondisi sosial budaya di masing-masing wilayah yang akan digabungkan
2. Perlunya mengidentifikasi potensi permasalahan yang mungkin akan muncul
3. Perlunya penjangkaran aspirasi masyarakat di masing-masing wilayah terkait dengan :
 - a. Opini terhadap rencana penggabungan kelurahan
 - b. Ekspektasi, harapan-harapan terkait dengan rencana penggabungan kelurahan
 - c. Usulan nama kelurahan yang baru

2.5.4. Aspek Efektifitas Pelayanan

Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi 5 syarat, yakni jumlah aparatur, luas wilayah dan jumlah penduduk, rasio pelayanan, rentang kerja. Syarat jumlah penduduk dan luas wilayah dibagi dalam 3 klaster, yaitu : (1) wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK dengan luas wilayah paling sedikit 3 Km², (2) wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK dengan luas wilayah paling sedikit 5 Km², dan (3) wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 900 jiwa atau 180 KK dengan luas wilayah paling sedikit 7 Km².

Bagian wilayah kerja kecamatan wilayahnya harus dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan menjadi syarat mutlak, seperti memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi dan fasilitas umum yang memadai.

Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan tersebut. Artinya, suatu kelurahan yang baru terbentuk yang belum berumur 5 tahun tidak bisa dimekarkan.

2.5.5. Aspek Efisiensi Anggaran

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dibebankan kepada APBD kabupaten/kota. Sementara untuk pembinaan dan pengawasan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Selain untuk efisiensi anggaran, penggabungan kelurahan juga akan memaksimalkan kinerja petugas pelaksana pengolahan aplikasi pelayanan kependudukan di Kelurahan terkait.

2.5.6. Aspek Hukum

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dapat dibentuk melalui penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang telah ada. Kelurahan juga dapat dihapus dengan tindakan meniadakan kelurahan yang ada. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan ini diatur dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2006. Permendagri ini sebagai pengganti Permendagri Nomor 65 Tahun 1999 yang sebelumnya berlaku. Erat kaitannya dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2006, landasan hukum dalam penggabungan wilayah kelurahan dalam kaitannya dengan efisiensi anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan INSTRUKSI PERDA 6 2009 Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- e. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009
- f. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
- g. Instruksi Walikota Surabaya Nomor Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemekaran Dan Penggabungan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

2.5.7. Aspek Kelembagaan (Perubahan Struktur Organisasi)

Dalam rangka penguatan kelembagaan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan public maka perlu dilakukan peningkatan efisiensi dan efektifitas kelembagaan kelurahan melalui tahapan-tahapan evaluasi (self-assesment) kelembagaan kelurahan dan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di daerah terdapat tiga alternative konsep kelembagaan kelurahan di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut :

- a. Alternatif I, yakni Penguatan Kelembagaan Kecamatan dengan Penghapusan Kelurahan
- b. Alternatif II, yakni Penggabungan Kelembagaan Kelurahan dan Kecamatan Menjadi Kelembagaan Baru
- c. Alternatif III, yakni Pengembalian Kelembagaan Kelurahan sebagai Unsur Kewilayahan.

Perubahan pada aspek kelembagaan atau perubahan struktur organisasi setelah penggabungan kelurahan semata-mata dimaksudkan untuk menjamin penyediaan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghindari pemborosan anggaran Negara.

2.6. Metode Skoring Penggabungan Kelurahan

Duabelas (12) Kelurahan (Kalianak, Genting, Greges, Tambak Langon, Prapen Panjang Jiwo, Klakah Rejo, Kandangan, Sukolilo, Komplek Kenjeran, Sumberrejo dan Tambak Dono) terpilih sebagai kelurahan yang akan digabungkan berdasarkan perhitungan skore yang dilihat dari 3 aspek, yakni jumlah penduduk, luas wilayah dan sarana prasana.

1. Kategori Jumlah Penduduk kelipatan "2" karena interval jumlah penduduknya banyak
 - K = Kurang (<4.500 jiwa)
 - C = Cukup (4.500 - 15.000 jiwa)
 - L = Padat (> 15.000 jiwa)

2. Kategori Luas Wilayah :

K = ($< 3 \text{ Km}^2$)

C = ($3 - 5 \text{ Km}^2$)

L = ($> 5 \text{ Km}^2$)

3. Kategori Sarana dan Prasarana :

K = Lebar jalan, luas bangunan dan fasilitas umum tidak memadai

C = Lebar jalan dan atau luas bangunan dan atau fasilitas umum memadai L =

Lebar jalan, luas bangunan dan fasilitas umum memadai

4. Skore :

4 s/d 9 = Kategori Kelurahan yang tidak perlu digabung

10 s/d 12 = Kategori Kelurahan yang perlu digabung

BAB III KONSEP DAN METODOLOGI

3.1. Konsep

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Suatu wilayah kelurahan dapat digabungkan apabila penyelenggaraan pemerintahan dianggap sudah tidak efektif. Wilayah yang direncanakan akan digabung dalam hal ini dapat digabungkan atau disatukan dengan wilayah lain yang letaknya berdekatan.

Pada PP No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan disebutkan bahwa penggabungan wilayah dapat dilakukan dengan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, dan sarana prasarana pemerintahan. Penggabungan wilayah kelurahan dapat didefinisikan sebagai proses penyatuan wilayah kelurahan yang dihapus kepada wilayah lain yang berdekatan.

3.1.1. Syarat Penggabungan Kelurahan

Prosedur pembentukan wilayah secara umum dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Adanya kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan
2. Adanya kajian akademis yang melibatkan pakar dan stakeholders untuk mengetahui urgensi pembentukan wilayah baru

3. Adanya penelitian awal yang dilaksanakan Tim Koordinasi Pengembangan Wilayah di tingkat kota
4. Draft usulan disampaikan kepada camat, kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD
5. Atas persetujuan DPRD, Walikota menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Penggabungan Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan penggabungan Kelurahan, mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk
 1. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK
 2. Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK
 3. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 900 jiwa atau 190 KK
- b. Luas wilayah
 1. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 3 Km²
 2. Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 5 Km²
 3. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit adalah 7 Km²
- c. Bagian wilayah Kerja
Yang termasuk dalam bagian wilayah kerja adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- d. Sarana prasarana pemerintah
 1. Memiliki kantor pemerintahan
 2. Memiliki jaringan perhubungan yang lancar
 3. Sarana komunikasi yang memadai
 4. Fasilitas umum yang memadai

3.2. Metodologi Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang mana dipandang sangat tepat untuk melihat pandangan maupun persepsi masyarakat tokoh-tokoh kunci, dan actor pemerintahan dalam rencana penggabungan Kelurahan di Kota Surabaya. Perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif adalah pada data yang digunakan dalam menganalisis. Kualitatif memiliki data yang bersifat deskriptif.

Dalam penelitian kualitatif bukanlah berdasar tabel dan angka-angka hasil pengukuran dan penilaian secara langsung yang mana dianalisis secara statistik. Data kualitatif adalah data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi di lapangan (Bungin, 2003:64)

Bogdan dan Taylor dalam Moleongmen definisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan kepada latar individu tersebut secara utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari keutuhan (Moleong, 2005:4)

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian berisi data-data berupa kata-kata dan gambar, semua dikumpulkan dan berkemungkinan menjadi kunci dalam menjawab dasar masalah dari pelaksanaan kegiatan ini, yakni penentuan nama baru kelurahan dan lokasi kelurahan baru yang digabungkan. Data dideskripsikan dan dikonstruksikan sesuai dengan subjek kegiatan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

3.3.1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara Focused Discussion Group (FGD).

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder, berupa data yang diperoleh secara tidak langsung yakni berupa literature yakni berupa buku, karya ilmiahserta bentuk publikasi lainnya terkait isu penggabungan kelurahan.

3.4. Teknik Focused Discussion Group (FGD)

Focused Group atau Group Interviewing dapat disebut sebagai metode pengumpulan data, sebagai sebuah metode maka FGD adalah upaya yang sistematis dalam pengumpulan data dan informasi. Makna dari FGD sendiri menurut Irwanto terdiri dari 3 kata kunci, yakni:

- Diskusi: bukan wawancara atau obrolan

Kelompok: bukan individual

- Terfokus: bukan bebas

Dengan demikian, FGD merupakan suatu proses pengumpulan data yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Dalam FGD para informan di kumpulkan pada suatu tempat dan proses pengambilan data atau informasi dilakukan oleh seorang fasilitator yang dibantu notulen. Berbeda dengan wawancara, fasilitator disini tidak selalu bertanya, tetapi mengemukakan suatu persoalan, suatu kasus, suatu kejadian sebagai bahan diskusi. Jelas dalam prosesnya dia akan sering bertanya, tetapi itu hanya sebagian dari keterampilan mengelola diskusi agar tidak didominasi oleh peserta (irwanto, 2006:2)

Hatmadji dan Mundiharno dalam Rianto Adi mengemukakan FGD merupakan diskusi kelompok yang pesertanya terbatas (terpilih) menurut kriteria tertentu dan pembahasannya memfokuskan pada topik tertentu. FGD bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu hal dari peserta diskusi tanpa harus ada kesepakatan pendapat antar peserta yang mengikutinya. FGD sangat berguna untuk memperoleh gambaran awal tentang persepsi responden (Adi, 2004: 93-93)

3.5. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dalam FGD dilakukan berdasarkan ciri-ciri:

- a. peserta dipilih benar-benar relevan (tahu atau berpengalaman dengan persoalan yang dikaji)
- b. semakin homogen, sebenarnya semakin tidak perlu melakukan FGD. Maksudnya apabila informan memiliki latar belakang yang sama, misalnya umur dan pekerjaan yang sama maka hasil FGD tidak akan objektif
- c. semakin heterogen, semakin sulit untuk menganalisis hasil FGD karena variasinya terlalu besar. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam menganalisis karena pandangan terhadap masalah yang diteliti sangat bervariasi
- d. pengalaman dalam hal materi yang hendak dipahami sebaiknya ada heterogenitas (walaupun tidak terlalu besar)

Pada kegiatan ini informan sebagai peserta FGD antara lain tokoh masyarakat dari masing-masing kelurahan yang akan digabungkan (RT/RW, tetua) dan aparatur pemerintah dengan tukposki terkait permasalahan (Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Lurah, Camat).

3.6. Metode Pelaksanaan FGD

FGD dihadiri oleh para informan, fasilitator, notulen dan pengambil gambar. Peserta memberi informasi berupa aspirasi mereka terhadap penggabungan Kelurahan di Kota Surabaya. FGD ini dilakukan beberapa hari, disesuaikan dengan kebutuhan dan dibagi ke dalam kelompok, yakni per Kelurahan yang akan digabungkan. Kelompok I (Kelurahan Genting dan Kalianak), Kelompok II (Kelurahan Greges dan Tambak Langon), Kelompok III (Kelurahan Prapen dan Panjang Jiwo), Kelompok IV (Kelurahan Kandangan dan Klakah rejo), Kelompok V (Kelurahan Sukolilo dan Komplek Kenjeran), Kelompok VI (Kelurahan Sumberrejo dan Sumber Dono).

Dalam pelaksanaan FGD ini beberapa variable yang didiskusikan dalam proses penggabungan kelurahan antara lain:

1. Jumlah penduduk yang memadai, sesuai peraturan yang berlaku
2. Luas wilayah yang proporsional, sesuai peraturan yang berlaku
3. Ketersediaan sarana dan prasarana kelurahan, diukur dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi dan komunikasi serta sarana pemerintahan termasuk didalamnya ketersediaan sumber daya manusia
4. Kehidupan sosial budaya masyarakat yang kondusif, di ukur dari jumlah dan mutu tempat peribadatan, tersedianya tempat kegiatan institusi social budaya yang kondusif sebagai penunjang kesatuan masyarakat, tersedianya sara olahraga yang memadai, dan dinamika masyarakat yang kondusif
5. Pertimbangan lain yang memungkinkan, diukur dari tingkat keamanan dan ketertiban wilayah, tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan dan rentang kendali pemerintahan.

3.7. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan FGD

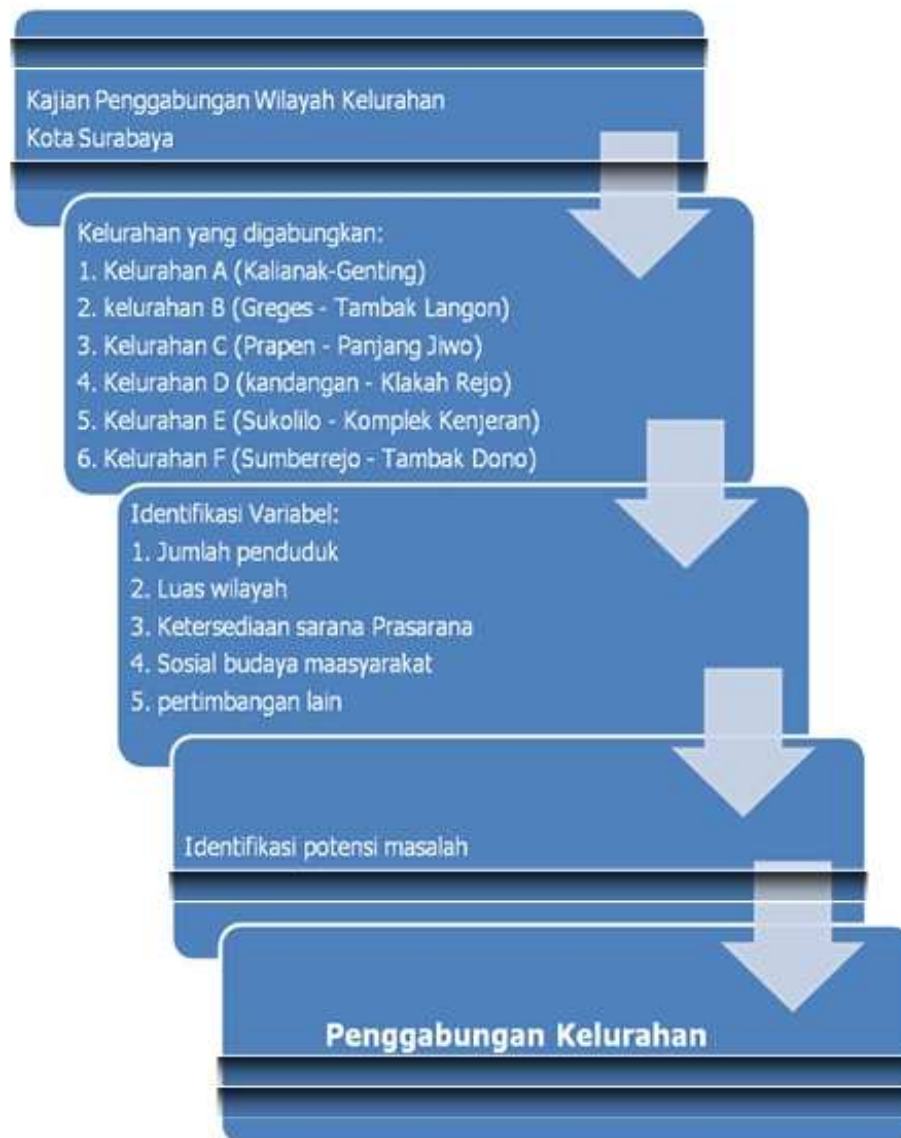
FGD dilaksanakan sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah ditentukan terlebih dahulu. Adapun waktu yang dianggap tepat untuk pelaksanaan FGD adalah pada malam hari, mengingat informan memiliki aktifitas bekerja pada siang harinya. Sedangkan lokasi yang dianggap representative adalah kantor kecamatan atau kelurahan dari salah satu kelurahan yang akan digabungkan.

3.8. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kota Surabaya, tepatnya di wilayah administratif kelurahan yaitu: Kelurahan Genting, Kelurahan Kalianak, Kelurahan Greges, Kelurahan Tambak Langon, Kelurahan Prapen, Kelurahan Panjang Jiwo,

Kelurahan Kandangan, Kelurahan Klakah rejo, Kelurahan Sukolilo, Kelurahan Komplek Kenjeran, Kelurahan Sumberrejo dan Kelurahan Sumber Dono.

Kerangka Analisis



BAB IV KONDISI EKSTING

4.1. Kelurahan Kalianak dan Genting

4.1.1. Batas Wilayah Kelurahan

Tabel 4.1
Batas Wilayah Kelurahan Kalianak dan Kelurahan Genting

Batas	Kel. KALIANAK	Kel. GENTING
Utara	Selat Madura	Kel. Kalianak Kec. Asemrowo, Kel. MoroKrembangan Kec. Krembangan
Timur	Sungai Kalianak	Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo
Selatan	Kel. Genting, Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo	Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo
Barat	Sungai Greges	Kel. Dupak Kec. Bubutan

Kelurahan Kalianak memiliki luas wilayah 202.092 ha dengan jumlah RT sebanyak 5 dan RW sebanyak 1. Sedangkan Kelurahan Genting memiliki luas wilayah 133.750 ha dengan 14 Rt dan 3 RW.

Jumlah penduduk Kelurahan Genting berbeda jauh dengan Kelurahan Kalianak. Dimana Kelurahan Genting memiliki jumlah penduduk 5.587 jiwa sedangkan Kelurahan Kalianak sejumlah 1.739.

Sebagian besar penduduk dari dua kelurahan adalah mayoritas berpendidikan tamat SD yakni 803 Jiwa untuk Kelurahan Kalianak dan 1882 jiwa untuk Kelurahan. Jumlah penduduk berpendidikan tinggi sangat kurang yakni 22 jiwa untuk Kelurahan Genting dan 5 jiwa untuk Kelurahan Kalianak.

Tabel 4.2
Tabel Kualitas Angkatan Kerja Penduduk
Kelurahan Kalianak dan Kelurahan Genting

N O	Keterangan	Kel. KALIANAK	Kel. GENTING
		Jumlah (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Penduduk tamat SLTA/Sederajat	605	713
2	Penduduk tamat SLTP/Sederajat	325	1796
3	Penduduk tamat SD/Sederajat	803	1882
4	Penduduk tamat S-3		
5	Penduduk tamat S-2		
6	Penduduk tamat S-1	5	22
7	Penduduk tamat D-3		10
8	Penduduk tamat D-2		34
9	Penduduk tamat D-1	1	10
	Jumlah	1739	4467

Struktur mata pencaharian kedua kelurahan terdiri dari sector jasa/perdagangan dan sector industry. Tercatat penduduk Kelurahan Genting lebih cenderung bekerja pada sector jasa/perdagangan (402 jiwa) sedangkan penduduk Kalianak bekerja di sector industri yakni 214 jiwa.

Tabel 4.3
Struktur Mata Pencaharian Penduduk
Kelurahan Kalianak dan Kelurahan Genting

N O	Keterangan	Kel. KALIANAK	Kel. GENTING
		Jumlah (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Pekerja disektor Jasa/Perdagangan	16	402
2	Pekerja disektor Industri	214	210

Status mata pencaharian penduduk Kalianak antara lain pegawai swasta (214 jiwa) dan pekerja kendaran umum sebanyak 87 jiwa. Sedangkan untuk status mata pencaharian penduduk Kelurahan Genting lebih beragam.

Tabel 4.4
Status Mata Pencaharian Penduduk
Kelurahan Kalianak dan Kelurahan Genting

N O	Status	Kel. Kalianak	Kel. Genting
		Pekerja	Pekerja
1	Jasa Pemerintahan / Non Pemerintah		
a	Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
	1). Pegawai Kelurahan	4	-
	2). PNS	4	20
	3). ABRI	-	15
	4). Guru	1	23
	5). Dokter	-	-
	6). Bidan	-	4
	7). Mantri Kesehatan / Perawat	-	1
b	Pensiunan ABRI / Sipil	1	24
C	Pegawai Swasta	214	53
2	Jasa Angkutan dan Transportasi		
a	Mobil Kendaraan Umum	87	-
3	Jasa Ketrampilan		
a	Tukang Kayu	1	31
b	Tukang Batu	1	28
C	Tukang Jahit/Bordir	2	18
d	Tukang Cukur	-	4

Untuk kualitas angkatan kerja dari Kelurahan Genting dan Kalianak sendiri adalah lulusan SD hingga SLTA. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Kualitas Angkatan Kerja
Kelurahan Kalianak dan Kelurahan Genting

N O	Keterangan	Kel. KALIANAK	Kel. GENTING
		Jumlah (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Jumlah angkatan kerja tidak tamat SD/Sederajat	25	82
2	Jumlah angkatan kerja tamat SLTP/Sederajat	37	102
3	Jumlah angkatan kerja tamat SLTA/Sederajat	65	165
4	Jumlah angkatan kerja tamat SD/Sederajat	53	221
5	Jumlah angkatan kerja tamat Perguruan Tinggi	3	28
6	Jumlah angkatan kerja tamat Diploma	1	14
	Jumlah	184	612

Tingkat kesejahteraan penduduk di Kelurahan Genting dan Kalianak rata-rata adalah keluarga sejahtera 1 dan sejahtera 2. Lihat tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Status Keluarga Sejahtera
Kelurahan Kalianak dan Kelurahan Genting

N O	Uraian	Kel. KALIANAK	Kel. GENTING
		Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga
1	Jumlah keluarga prasejahtera	152	191
2	Jumlah keluarga sejahtera 1 (Miskin)	205	394
3	Jumlah keluarga sejahtera 2	190	309
4	Jumlah keluarga sejahtera 3	125	275
5	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	4	82
	Total jumlah kepala keluarga	676	1497

4.1.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Kelurahan Genting memiliki sarana pendidikan berupa PAUD (4 unit) dan TK (3 unit) juga memiliki sarana kesehatan RS Bersalin (3 unit) dan 1 unit Puskesmas Pembantu. Sedangkan Kelurahan Kalianak tidak memiliki sarana maupun prasarana pendidikan dan kesehatan. Untuk sarana ekonomi, keduanya memiliki beberapa sarana dan tercatat dengan kondisi yang baik. Lihat tabel berikut:

Tabel 4.7
Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Kelurahan Kalianak dan Kelurahan Genting

N O	Jenis Prasarana	Kel. KALIANAK		Kel. GENTING	
		Ada/Tidak	Baik/Rusak	Ada/Tidak	Baik/Rusak
1	Balai Desa/ Kantor Kelurahan	Ada	Rusak	Ada	Baik
2	Meja	Ada	Baik	Ada	Baik
3	Kursi	Ada	Baik	Ada	Baik
4	Mesin Tik	Ada	Baik	Ada	Baik
5	Kalkulator	Ada	Baik		
6	Lemari Arsip	Ada	Baik	Ada	Baik
7	Papan Penyajian Data	Ada	Baik	Ada	Rusak
8	Ruang Lurah	Ada	Baik	Ada	Baik
9	Ruang Sekretaris Desa	Tidak		Ada	Baik
10	Ruang LKMD/ Sebutan Lain	Tidak		Tidak	
11	Ruang PPK	Tidak		Tidak	
12	Ruang Rapat	Tidak		Ada	Baik
13	Ruang Pelayanan	Ada	Baik	Ada	Baik
	Jumlah	9		10	

4.1.3. Pelayanan Masyarakat

Berikut ini komparasi pelayanan masyarakat dari kedua kelurahan, dilihat dari 4 klausul.

Tabel 4.8
Pelayanan Masyarakat
Kelurahan Kalianak dan Kelurahan Genting

Kelurahan KALIANAK	Kelurahan GENTING
1. Apakah SDM Kelurahan seimbang dengan masyarakat yang dilayani (berdasarkan Rasio Pelayanan Masyarakat) ? Berapa rata-rata pelayanan dalam 1 bulan pada 2 Tahun Terakhir ? Seimbang, Rata-rata 57 Pelayanan dalam 1 bulan	1. Apakah SDM Kelurahan seimbang dengan masyarakat yang dilayani (berdasarkan Rasio Pelayanan Masyarakat) ? Berapa rata-rata pelayanan dalam 1 bulan pada 2 Tahun Terakhir ? Seimbang
2. Apakah semua keluhan dan keinginan masyarakat terakomodasi dengan jumlah SDM yang ada serta sarana dan prasarana di Kelurahan ? Ada yang tidak terakomodasi	2. Apakah semua keluhan dan keinginan masyarakat terakomodasi dengan jumlah SDM yang ada serta sarana dan prasarana di Kelurahan ? Terakomodasi
3. Seandainya ada penggabungan Kelurahan, Kira - Kira Kantor Kelurahan yang mana yang kondusif dipakai ? Kelurahan Kalianak, karena Kelurahan Genting masuk kampung	3. Seandainya ada penggabungan Kelurahan, Kira - Kira Kantor Kelurahan yang mana yang kondusif dipakai ? Kelurahan Genting
4. Kesimpulan dan Saran dari pelaksanaan Penggabungan Kelurahan yang dipakai ? Pentingnya sosialisasi kepada warga terkait penggabungan kelurahan	4. Kesimpulan dan Saran dari pelaksanaan Penggabungan Kelurahan yang dipakai ? Penggabungan Kelurahan kalau bisa secepatnya, sebelum ada pemilihan LKMK, RW dan RT Tahun 2013 dan perlu gedung/kantor kelurahan baru untuk menunjang pelayanan



4.2. Kelurahan Greges dan Tambak Langon

4.2.1. Batas Wilayah Kelurahan

Tabel 4.9
Batas Wilayah Kelurahan Greges dan Kelurahan Tambak Langon

Batas	Kelurahan Tambak Langon	Kelurahan Greges
Utara	Kel : Selat Madura Kec : Madura	Kel : Selat Madura Kec : Madura
Timur	Kel : Greges Kec : Asemrowo	Kel : Kalianak Kec : Asemrowo
Selatan	Kel : Balongsari Kec : Tandes	Kel : Karangpoh, Tanjungsari Kec : Tandes, Sukomanunggal
Barat	Kel : Tambak Oso Wilangun Kec : Benowo	Kel : Tambak Langon Kec : Asemrowo

Luas wilayah kelurahan Tambak Langon lebih kecil dibandingkan luas Kelurahan Greges, yakni 277,71 ha (terdiri dari 6 RT dan 2 RW) dibanding dengan 418,577 ha Kelurahan Greges yang terdiri dari 14 RT dan 4 RW. Sedangkan untuk jumlah penduduk, Kelurahan Greges memiliki jumlah penduduk 4.729 jiwa, lebih banyak dari pada jumlah penduduk Kelurahan Tambak Langon yang hanya berjumlah 2.211 jiwa.

Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Greges mayoritas adalah lulusan SLTP yakni 1.782 jiwa dan lulusan SD sebanyak 1.299 jiwa. Sedangkan untuk Kelurahan Tambak Langon, tingkat pendidikan penduduk terbanyak pada tamat SD yakni 826 Jiwa.

Tabel 4.10
Tingkat Pendidikan Penduduk
Kelurahan Tambak Langon dan Greges

NO	Keterangan	Kel. Tambak Langon	Kel. Greges
		Jumlah	Jumlah
1	Penduduk tamat SLTP/Sederajat	458 orang	1.782 orang
2	Penduduk tamat SLTA/Sederajat	386 orang	618 orang
3	Penduduk tamat SD/Sederajat	826 orang	1.299 orang
4	Penduduk tamat S-3	- orang	- orang
5	Penduduk tamat S-2	3 orang	5 orang
6	Penduduk tamat S-1	99 orang	82 orang
7	Penduduk tamat D-3	23 orang	27 orang
8	Penduduk tamat D-2	11 orang	11 orang
9	Penduduk tamat D-1	15 orang	- orang
	Jumlah	1.821 orang	3.824 orang

Struktur mata pencaharian kedua kelurahan adalah disektor jasa/perdagangan dan industri. Namun, penduduk kedua kelurahan tercatat lebih banyak disektor industri yakni 215 jiwa untuk Kelurahan Tambak Langon dan 1.200 Jiwa untuk Kelurahan Greges.

Tabel 4.11
Struktur Mata Pencaharian Penduduk
Kelurahan Tambak Langon dan Kelurahan Greges

No	Keterangan	Kel. Tambak Langon	Kel. Greges
		Jumlah	jumlah
1	Pekerja disektor Jasa/Perdagangan	32 Orang	111 Orang
2	Pekerja disektor Industri	215 Orang	1.200 Orang

4.2.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Prasarana Pendidikan di Kelurahan Greges berjumlah 4 unit, yang terdiri dari Taman Kanak-kanak dan SD dengan kondisi yang baik, selain itu Kelurahan Greges juga memiliki beberapa unit sarana kesehatan seperti RS Bersalin, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik. Sedangkan Kelurahan Tambak langon memiliki sarana pendidikan seperti Taman Kanak-kanak dan SD, juga Puskesmas pembantu sebagai sarana kesehatan.

Sarana ekonomi di kedua kelurahan tercatat dalam kondisi baik, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Sarana Ekonomi Kelurahan Tambak Langon dan Kelurahan Greges

No.	Jenis Prasarana	Kel. Tambak Langon		Kel. Greges	
		Keterangan		Keterangan	
		Ada / Tidak	Baik / Rusak	Ada / Tidak	Baik / Rusak
1	Balai Desa/ Kantor Kelurahan	Ada	Baik	Ada	-
2	Meja	Ada	Baik	Ada	Baik
3	Kursi	Ada	Baik	Ada	Baik
4	Mesin Tik	Ada	Rusak	Ada	Baik
5	Kalkulator	Tidak	-	Ada	Rusak
6	Lemari Arsip	Ada	Baik	Ada	Baik
7	Papan Penyajian Data	Ada	Baik	Tidak	-
8	Ruang Lurah	Ada	Baik	Ada	Baik
9	Ruang Sekretaris Desa	Ada	Baik	Ada	Baik
10	Ruang LKMD/Sabutan Lain	Ada	Baik	Tidak	-
11	Ruang PKK	Ada	Baik	Tidak	-
12	Ruang Rapat	Ada	Baik	Ada	Baik
13	Ruang Pelayanan	Ada	Baik	Ada	Baik
	Jumlah				

4.2.3. Pelayanan Masyarakat

Berikut ini komparasi pelayanan masyarakat dari kedua kelurahan, dilihat dari 4 klausul.



Tabel 4.13
Pelayanan Masyarakat
Kelurahan Tambak Langon dan Kelurahan Greges

Kelurahan Tambak Langon	Kelurahan Greges
<p>1. Apakah SDM Kelurahan seimbang dengan masyarakat yang dilayani (berdasarkan Rasio Pelayanan Masyarakat) ? Berapa rata-rata pelayanan dalam 1 bulan pada 2 Tahun Terakhir ?</p> <p>Ya, SDM cukup Pelayanan per bulan $\pm 5 \times 22 = 110 \times 24 = 2.640$</p>	<p>1. Apakah SDM Kelurahan seimbang dengan masyarakat yang dilayani (berdasarkan Rasio Pelayanan Masyarakat) ? Berapa rata-rata pelayanan dalam 1 bulan pada 2 Tahun Terakhir ?</p> <p>Untuk saat ini SDM Kelurahan Greges terutama pada Seksi Tata Pemerintahan relatif kurang seimbang (staff yang membantu Kasi Tata Pemerintahan maiz kurang) Rata-rata pelayanan dalam 1 bulan 140-160 dokumen / KTP / KSK</p>
<p>2. Apakah semua keluhan dan keinginan masyarakat terakomodasi dengan jumlah SDM yang ada serta sarana dan prasarana di Kelurahan ?</p> <p>ya</p>	<p>2. Apakah semua keluhan dan keinginan masyarakat terakomodasi dengan jumlah SDM yang ada serta sarana dan prasarana di Kelurahan ?</p> <p>Tidak semua keluhan dan keinginan masyarakat dapat terakomodasi, mengingat jumlah SDM yang tidak memadai dan sarana prasarana di kelurahan yang terbatas.</p>
<p>3. Seandainya ada penggabungan Kelurahan, Kira - Kira Kantor Kelurahan yang mana yang kondusif dipakai ?</p> <p>Mengingat Kelurahan Greges tidak punya gedung sendiri, sedangkan gedung / bangunan Kelurahan Tambak Langon adalah aset Pemkot Surabaya maka sebaiknya penggabungan di Kelurahan Tambak Langon</p>	<p>3. Seandainya ada penggabungan Kelurahan, Kira - Kira Kantor Kelurahan yang mana yang kondusif dipakai ?</p> <p>Secara fisik Kantor Kelurahan Tambak Langon lebih layak / kondusif tetapi dari pertimbangan komunitas / jumlah warga jauh lebih banyak Kelurahan Greges</p>
<p>4. Kesimpulan dan Saran dari pelaksanaan Penggabungan Kelurahan yang dipakai ?</p> <p>Gedung Kantor Kelurahan Tambak Langon perlu adanya pembenahan / perbaikan, utamanya perlu aula untuk kegiatan rapat / pertemuan Sian untuk dipakai</p>	<p>4. Kesimpulan dan Saran dari pelaksanaan Penggabungan Kelurahan yang dipakai ?</p> <p>Penggabungan Kelurahan Greges dan Kelurahan Tambak Langon baik untuk direalisasikan mengingat jumlah warganya yang relatif sedikit, sehingga penggabungan ini akan lebih efisien dalam penggunaan anggaran operasional.</p>

4.3. Kelurahan Prapen dan Panjang Jiwo

4.3.1. Batas Wilayah Kelurahan

Tabel 4.14
Batas Wilayah Kelurahan Prapen dan Panjang Jiwo

Batas	Kelurahan Prapen	Kelurahan Panjang Jiwo
Utara	Kel : Panjang Jiwo Kec : Tenggilis Mejoyo	Kel : Nginden Jangkungan Kec : Sukolilo
Timur	Kel : Tenggilis Mejoyo Kec : Tenggilis Mejoyo	Kel : Kali Rungkut Kec : Rungkut
Selatan	Kel : Kendangsari Kec : Tenggilis Mejoyo	Kel : Prapen Kec : Tenggilis Mejoyo
Barat	Kel : Sidosermo Kec : Wonocolo	Kel : Sidosermo Kec : Tenggilis Mejoyo

Luas wilayah kedua kelurahan berbeda cukup jauh, Kelurahan Panjang Jiwo hanya memiliki luas wilayah 7.4 ha dengan 28 RT dan 5 RW sedangkan luas Kelurahan Prapen adalah 149.019 ha dengan 15 RT dan 3 RW. Namun demikian, untuk jumlah penduduk, Kelurahan Panjang Jiwo memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak, yakni 10.372 jiwa sedang Kelurahan Prapen hanya memiliki 3.299 jiwa penduduk.

Tabel 4.15
Tingkat Pendidikan Penduduk
Kelurahan Prapen dan Kelurahan Panjang Jiwo

NO	Keterangan	Kel. Prapen	Kel. Panjang Jiwo
		Jumlah	Jumlah
1	Penduduk tamat SLTP/Sederajat	499 orang	1.566 orang
2	Penduduk tamat SLTA/Sederajat	1.296 orang	3.008 orang
3	Penduduk tamat SD/Sederajat	429 orang	2.541 orang
4	Penduduk tamat S-3	23 orang	-
5	Penduduk tamat S-2	17 orang	10 orang
6	Penduduk tamat S-1	660 orang	1.037 orang
7	Penduduk tamat D-3	93 orang	62 orang



8	Penduduk tamat D-2	53 orang	156 orang
9	Penduduk tamat D-1	65 orang	166 orang
	Jumlah	3.135 orang	8546 Orang

Berdasar tabel di atas, penduduk berpendidikan tinggi cukup banyak yakni 1.037 jiwa untuk Kelurahan Panjang Jiwo dan 660 jiwa untuk Kelurahan Prapen. Namun mayoritas penduduk di kedua kelurahan berpendidikan SLTA/ sederajat. Sebanyak 3.008 jiwa penduduk untuk Kelurahan Panjang Jiwo dan 1.296 jiwa untuk Kelurahan Prapen.

Status Mata Pencaharian Penduduk di Kelurahan Panjang Jiwo tercatat sebanyak 933 jiwa adalah PNS dan sebanyak 3.319 jiwa adalah pegawai swasta. Sedangkan penduduk di Kelurahan Prapen tercatat 213 penduduk sebagai PNS dan 136 jiwa bekerja sebagai pegawai swasta.

Tabel 4.16
Status Mata Pencaharian Penduduk
Kelurahan Prapen dan Kelurahan Panjang Jiwo

No	Status	Kelurahan Prapen	Kelurahan Panjang Jiwo
		Jumlah Pekerja	Jumlah Pekerja
1	Jasa Pemerintahan / Non Pemerintahan		
a.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
	1). Pegawai Kelurahan	5	8
	2). PNS	213	933
	3). ABRI	7	27
	4). Guru	-	31
	5). Dokter	-	3
	6). Bidan	-	5
b.	Pensin ABRI / Sipil	29	29
c.	Pegawai Swasta	136	3.319
2	Jasa penginapan		
a.	Wisma / Mess	-	1
3	Jasa Pelayanan Hukum dan Nasihat		
a.	Pengacara	-	1

4.3.2. Ketersediaan Sarana Prasarana

Kelurahan Prapen tercatat memiliki sarana kesehatan berupa puskesmas dan puskesmas pembantu sedangkan Panjang Jiwo tidak memiliki sarana kesehatan.

Tabel 4.17
Ketersediaan Sarana Kesehatan
Kelurahan Prapen dan Kelurahan Panjang Jiwo

No	Jenis Prasarana	Kel. Prapen		Kel. Panjang Jiwo	
		Keterangan		Keterangan	
		Ada / Tidak	Baik / Rusak	Ada / Tidak	Baik / Rusak
1	RS Bersalin	-	-	-	-
2	Puskesmas	Ada (1)	Baik	Tidak ada	-
3	Puskesmas Pembantu	Ada (1)	Baik	Tidak ada	-
4	Poliklinik	-	-	Tidak ada	-
	Jumlah Nilai				

Sedangkan untuk sarana ekonomi, kedua kelurahan memiliki beberapa sarana berikut ini dan tercatat dalam kondisi baik.

Tabel 4.18
Prasarana Ekonomi Kelurahan Prapen dan Kelurahan Panjang Jiwo

No	Jenis Prasarana	Kelurahan Prapen		Kelurahan Panjang Jiwo	
		Ada / Tidak	Baik / Rusak	Ada / Tidak	Baik / Rusak
1	Balai Desa/ Kantor Kelurahan	Ada (1)	Baik	Ada	Baik
2	Meja	Ada	Baik	Ada (9)	Baik
3	Kursi	Ada	Baik	Ada (32)	Baik
4	Mesin Tik	Ada	Baik	Ada (2)	Baik
5	Kalkulator	Ada	Baik	Ada	Baik
6	Lemari Arsip	Ada	Baik	Ada (6)	Baik
7	Papan Penyajian Data	Ada	Baik	Ada (1)	Baik
8	Ruang Lurah	Ada	Baik	Ada	Baik
9	Ruang Sekretaris Desa	Tidak Ada	-	Ada	Baik
10	Ruang LKMD/Sabutan Lain	Tidak Ada	-	Ada	Baik
11	Ruang PKK	Ada Pendopo	-	Ada	Baik
12	Ruang Rapat	Tidak Ada	-	Ada	Baik
13	Ruang Pelayanan	Ada	Baik	Ada	Baik
	Jumlah				

4.3.3. Pelayanan Masyarakat

Berikut ini komparasi pelayanan masyarakat dari kedua kelurahan, dilihat dari 4 klausul.

Tabel 4.19
Pelayanan masyarakat Kelurahan Prapen dan Panjang Jiwo

Kelurahan Prapen	Kelurahan Panjang Jiwo
<p>1. Apakah SDM Kelurahan seimbang dengan masyarakat yang dilayani (berdasarkan Rasio Pelayanan Masyarakat) ? Berapa rata-rata pelayanan dalam 1 bulan pada 2 Tahun Terakhir ?</p> <p>Seimbang</p>	<p>1. Apakah SDM Kelurahan seimbang dengan masyarakat yang dilayani (berdasarkan Rasio Pelayanan Masyarakat) ? Berapa rata-rata pelayanan dalam 1 bulan pada 2 Tahun Terakhir ?</p> <p>Seimbang</p>
<p>2. Apakah semua keluhan dan keinginan masyarakat terakomodasi dengan jumlah SDM yang ada serta sarana dan prasarana di Kelurahan ?</p> <p>Terakomodasi</p>	<p>2. Apakah semua keluhan dan keinginan masyarakat terakomodasi dengan jumlah SDM yang ada serta sarana dan prasarana di Kelurahan ?</p> <p>Terakomodasi</p>
<p>3. Seandainya ada penggabungan Kelurahan, Kira - Kira Kantor Kelurahan yang mana yang kondusif dipakai ?</p> <p>Letak kantor :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kantor Kelurahan Prapen lebih dekat dengan Kecamatan Tenggilis Mejoyo Akses menuju kantor kelurahan, Warga Kelurahan Panjang Jiwo lebih praktis karena satu arah, kalau Kelurahan Panjang warga Kelurahan Prapen melalui jalur yang lebih jauh, karena berlawanan arah. 	<p>3. Seandainya ada penggabungan Kelurahan, Kira - Kira Kantor Kelurahan yang mana yang kondusif dipakai ?</p> <p>Letak kantor :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah aparat kelurahan Panjang Jiwo lebih banyak, sehingga Lebih mudah penyesuaiannya Kelurahan Prapen yang bergabung Akses Ke Kecamatan Tenggilis Mejoyo ada Alternatif, sehingga tidak masalah bagi warga untuk akses ke Kecamatan Tenggilis Mejoyo
<p>4. Kesimpulan dan Saran dari pelaksanaan Penggabungan Kelurahan yang dipakai ?</p> <p>Saran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Penggabungan dipercepat, karena volumen kecil malah tidak efektif dalam pelayanan kepada masyarakat Kantor Kelurahan bila digabung dan yang dipakai kantor kelurahan Prapen harus direnovasi terlebih dahulu 	<p>4. Kesimpulan dan Saran dari pelaksanaan Penggabungan Kelurahan yang dipakai ?</p> <p>Saran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Masyarakat Kelurahan Panjang Jiwo secara garis besar menginginkan Kelurahan Prapen yang bergabung, karena warganya lebih sedikit Akses pelayanan masyarakat untuk lansia, lebih mudah ke Kelurahan



	Panjang Jiwo karena jumlah lansia lebih banyak di Kelurahan panjang Jiwo.
--	---

4.4. Kelurahan Klakah Rejo dan Kandangan

4.4.1. Batas Wilayah Kelurahan

Tabel 4.20
Batas Wilayah Kelurahan Klakah rejo dan Kelurahan Kandangan

Batas Kelurahan	Kelurahan Klakah Rejo	Kelurahan Kandangan
Utara	Kel : Kandangan Kec : Benowo	Kel : Tambak Langon Kec : Asemrowo
Timur	Kel : Kandangan Kec : Benowo	Kel : Banjar Sugihan Kec : Tandes
Selatan	Kel : Bringin Kec : Sambikerep	Kel : Bringin Kec : Sambikerep
Barat	Kel : Sememi Kec : Benowo	Kel : Klakahrejo Kec : Benowo

Luas wilayah Kelurahan Klakah Rejo tercatat 42 Ha dengan 11 RT dan 2 RW sedangkan Kelurahan Kandangan adalah 298,81 ha dengan 41 RT dan 7 RW. Jumlah penduduk Kelurahan Kandangan jauh melampaui Kelurahan Klakah Rejo, yakni tercatat 14.394 jiwa dibanding penduduk Kelurahan Klakah Rejo yaitu 5.163 jiwa. Untuk sebaran tingkat pendidikan penduduk, rata-rata baik penduduk Klakah Rejo maupun Kandangan adalah penduduk tamatan SD/ sederajat dan SLTA/ sederajat.

Tabel 4.21
Tingkat Pendidikan Penduduk
Kelurahan Klakah Rejo dan Kelurahan Kandangan

NO	Keterangan	Kel. Klakah Rejo	Kel. Kandangan
		Jumlah	Jumlah
1	Penduduk tamat SLTP/Sederajat	468 orang	3.550 orang
2	Penduduk tamat SLTA/Sederajat	1.525 orang	3.250 orang
3	Penduduk tamat SD/Sederajat	1.524 orang	5.570 orang

4	Penduduk tamat S-3	1 orang	88 orang
5	Penduduk tamat S-2	2 orang	290 orang
6	Penduduk tamat S-1	72 orang	450 orang
7	Penduduk tamat D-3	9 orang	
8	Penduduk tamat D-2	8 orang	
9	Penduduk tamat D-1	3 orang	
	Jumlah	3.612 orang	13.198 orang

4.4.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Kelurahan Klakah Rejo dan Kandangan memiliki beberapa sarana pendidikan diantaranya Taman kanak-kanak dan SD. Sedangkan untuk sarana kesehatan tercatat hanya kandangan saja yang memiliki Rumah Sakit Bersalin dan Puskesmas Pembantu.

Tabel 4.22
Sarana Pendidikan Kelurahan Klakah Rejo dan Kelurahan Kandangan

No	Jenis Prasarana	Kel. Klakah Rejo		Kel. Kandangan	
		Keterangan		Keterangan	
		Ada / Tidak	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Ada / Tidak
1	Taman kanak-kanak (TK)	5		Ada	Baik
2	SLTA/Sederajat			----	
3	SD/Sederajat	2		Ada	Baik
	Jumlah	7			

Tabel 4.23
Sarana Kesehatan Kelurahan Klakah Rejo dan Kelurahan Kandangan

No	Jenis Prasarana	Kel. Klakah Rejo		Kel. Kandangan	
		Keterangan		Keterangan	
		Ada / Tidak	Baik / Rusak	Ada / Tidak	Baik / Rusak
1	RS Bersalin	-	-	Ada	Baik
2	Puskesmas	-	-	-	-
3	Puskesmas Pembantu	-	-	Ada	Baik
4	Poliklinik	-	-		
	Jumlah Nilai				

Prasarana ekonomi kedua kelurahan tercatat sebagai berikut.

Tabel 4.24
Prasarana Ekonomi Kelurahan Klakah Rejo dan Kelurahan Kandangan

No	Jenis Prasarana	Kel. Klakah Rejo		Kel. Kandangan	
		Keterangan	Keterangan	Keterangan	Keterangan
		Ada / Tidak	Baik / Rusak	Ada / Tidak	Baik / Rusak
1	Balai Desa/ Kantor Kelurahan	1		Ada	Baik
2	Meja	7		Ada	
3	Kursi	35		Ada	
4	Mesin Tik	1		Ada	Rusak
5	Kalkulator	1		Ada	
6	Lemari Arsip	5		Ada	Baik
7	Papan Penyajian Data	-		Ada	
8	Ruang Lurah	1		Ada	Baik
9	Ruang Sekretaris Desa	1		Ada	Baik

4.4.3. Pelayanan Masyarakat

Berikut ini komparasi pelayanan masyarakat dari kedua kelurahan, dilihat dari 4 klausul.

Tabel 4.25
Pelayanan Masyarakat Kelurahan Klakah Rejo dan Kelurahan Kandangan

Kelurahan Klakah Rejo	Kelurahan Kandangan
1. Apakah SDM Kelurahan seimbang dengan masyarakat yang dilayani (berdasarkan Rasio Pelayanan Masyarakat) ? Berapa rata-rata pelayanan dalam 1 bulan pada 2 Tahun Terakhir ? SDM seimbang, pelayanan rata2 80%	1. Apakah SDM Kelurahan seimbang dengan masyarakat yang dilayani (berdasarkan Rasio Pelayanan Masyarakat) ? Berapa rata-rata pelayanan dalam 1 bulan pada 2 Tahun Terakhir ? Tidak seimbang
2. Apakah semua keluhan dan keinginan masyarakat terakomodasi dengan jumlah SDM yang ada serta sarana dan prasarana di Kelurahan ? iya	2. Apakah semua keluhan dan keinginan masyarakat terakomodasi dengan jumlah SDM yang ada serta sarana dan prasarana di Kelurahan ? kurang terakomodasi karena jumlah SDM kurang mendukung



3. Seandainya ada penggabungan Kelurahan, Kira - Kira Kantor Kelurahan yang mana yang kondusif dipakai ? Kelurahan Klakah Rejo	3. Seandainya ada penggabungan Kelurahan, Kira - Kira Kantor Kelurahan yang mana yang kondusif dipakai ? Kelurahan Kandangan
4. Kesimpulan dan Saran dari pelaksanaan Penggabungan Kelurahan yang dipakai ? kantor baru dibangun	4. Kesimpulan dan Saran dari pelaksanaan Penggabungan Kelurahan yang dipakai ? Dengan adanya penggabungan diharapkan agar dapat meningkatkan efisiensi & optimalisasi kepada masyarakat

4.5. Kelurahan Sumberrejo dan Tambak Dono

4.5.1. Batas Wilayah Kelurahan

Tabel 4.26
Batas Wilayah Kelurahan Tambak Dono dan Kelurahan Sumberrejo

Batas Kelurahan	Kel. Tambakdono	Kel. Sumberrejo
Utara	Kel : Sungai Lamong Kec :	Kel : Tambakdono Kec : Pakal
Timur	Kel : Sumberrejo Kec : Pakal	Kel : Benowo Kec : Pakal
Selatan	Kel : Sumberrejo Kec : Pakal	Kel : Desa Kepatihan Kec : Menganti
Barat	Kel : Sungai Lamong Kec :	Kel : Desa Jono Kec : Cerme

Luas wilayah Kelurahan Tambak Dono dan Sumberrejo berbeda tipis, Kelurahan Tambak Dono memiliki luas wilayah 305.130 ha dengan (RT dan 3 RW, sedang Kelurahan Sumberrejo memiliki luas wilayah 449.937 ha dengan 25 RT dan 5 RW. Jumlah penduduk lebih banyak terdapat di Sumberrejo yakni 10.372 jiwa dan 7.479 untuk jumlah penduduk Tambak Dono. Status mata pencaharian penduduk kedua kelurahan tercatat rata-rata merupakan pegawai swasta.

Tabel 4.27
Status Mata Pencaharian Penduduk
Kelurahan Tambak Dono dan Kelurahan Sumberrejo

No	Status	Kel. Tambakdono		Kel. Sumberrejo	
		Jumlah		Jumlah	
		Pekerja	Pemilik	Pekerja	Pemilik
1	Jasa Pemerintahan / Non Pemerintahan				
a.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)				
	1). Pegawai Kelurahan	1			
	2).PNS	19		121	
	3).ABRI	5		15	
	4).Guru	19			
	5).Dokter	-		1	
	6).Bidan	-		10	
	7).Mantri Kesehatan / Perawat	2		15	
b.	Pensin ABRI / Sipil	13		67	
c.	Pegawai Swasta	372		987	
d.	Pegawai BUMN/BUMD	-		23	
e.	Pensiunan Swasta	-			
2	Jasa Angkutan dan Transportasi				
a.	Mobil Kendaraan Umum			2	
3	Jasa Pelayanan Hukum dan Nasihat				
a.	Pengacara			4	
4	Jasa Ketrampilan				
a.	Tukang Kayu	55		202	
b.	Tukang Batu	67		278	
c.	Tukang Jahit/Bordir	5		27	
d.	Tukang Cukur	1		4	

4.5.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Kelurahan Tambak Dono memiliki 2 sarana pendidikan berupa taman kanak-kanak dan 2 SD/ sederajat. Sedangkan Kelurahan Sumberrejo memiliki 8 taman kanak-kanak dan 4 SD/ sederajat. Dimana kesemua sarana pendidikan ini tercatat dalam kondisi baik. Untuk sarana kesehatan, kedua kelurahan sama-sama hanya memiliki 1

unit sarana kesehatan yakni berupa puskesmas pembantu. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 4.28
Sarana Pendidikan Kelurahan Tambak Dono dan Sumberrejo

No	Jenis Prasarana	Kel. Tambakdono		Kel. Sumberrejo	
		Keterangan		Keterangan	
		Ada / Tidak	Baik / Rusak	Ada / Tidak	Baik / Rusak
1	Taman kanak-kanak (TK)	Ada (2)	Baik	Ada (8)	Baik
2	SLTA/Sederajat	Tidak Ada		Tidak Ada	
3	SD/Sederajat	Ada (2)	Baik	Ada (4)	Baik
	Jumlah	4	-	12	-

Tabel 4.29
Sarana Kesehatan Kelurahan Tambak Dono dan Kelurahan Sumberrejo

No	Jenis Prasarana	Kel. Tambakdono		Kel. Sumberrejo	
		Keterangan		Keterangan	
		Ada / Tidak	Baik / Rusak	Ada / Tidak	Baik / Rusak
1	RS Bersalin	Tidak Ada	-	Tidak Ada	
2	Puskesmas	Tidak Ada		Tidak Ada	
3	Puskesmas Pembantu	Ada (1)	Baik	Ada (1)	Baik
4	Poliklinik	Tidak Ada	-	Tidak Ada	
	Jumlah Nilai	1		1	

Sarana ekonomi tercatat cukup lengkap, namun disayangkan bahwa beberapa prasarana di Kelurahan Tambak Dono dalam kondisi rusak sedangkan prasarana di Sumberrejo dalam kondisi baik kecuali untuk kondisi papan penyajian data, yang mana dinyatakan rusak.

Tabel 4.30
Prasarana Ekonomi Kelurahan Tambak Dono dan Kelurahan Sumberrejo

No	Jenis Prasarana	Keterangan		Keterangan	
		Ada / Tidak	Baik / Rusak	Ada / Tidak	Baik / Rusak
1	Balai Desa/ Kantor Kelurahan	Ada	Rusak	Ada	Baik
2	Meja	Ada (8)	Rusak (2)	Ada	Baik
3	Kursi	Ada (7)	Rusak (2)	Ada	Baik
4	Mesin Tik	Ada (7)	Rusak (1)	Ada	Baik
5	Kalkulator	Ada (1)	Rusak (1)	Tidak Ada	-
6	Lemari Arsip	Ada (12)	Rusak (1)	Ada	Baik

7	Papan Penyajian Data	Ada (1)		Ada	Rusak
8	Ruang Lurah	Ada	Baik	Ada	Baik
9	Ruang Sekretaris Desa	Ada	Baik	Ada	Baik
10	Ruang LKMD/Sabutan Lain	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
11	Ruang PKK	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
12	Ruang Rapat	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
13	Ruang Pelayanan	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-

4.5.3. Pelayanan Masyarakat

Berikut ini komparasi pelayanan masyarakat dari kedua kelurahan, dilihat dari 4 klausul.

Tabel 4.31
Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tambak Dono dan Sumberrejo

Kelurahan Sukolilo	Kelurahan Komplek Kenjeran
1. Apakah SDM Kelurahan seimbang dengan masyarakat yang dilayani (berdasarkan Rasio Pelayanan Masyarakat) ? Berapa rata-rata pelayanan dalam 1 bulan pada 2 Tahun Terakhir ? Seimbang ± 160 Pelayan	1. Apakah SDM Kelurahan seimbang dengan masyarakat yang dilayani (berdasarkan Rasio Pelayanan Masyarakat) ? Berapa rata-rata pelayanan dalam 1 bulan pada 2 Tahun Terakhir ? ya 60 Pelayanan
2. Apakah semua keluhan dan keinginan masyarakat terakomodasi dengan jumlah SDM yang ada serta sarana dan prasarana di Kelurahan ? ya	2. Apakah semua keluhan dan keinginan masyarakat terakomodasi dengan jumlah SDM yang ada serta sarana dan prasarana di Kelurahan ? ya
3. Seandainya ada penggabungan Kelurahan, Kira - Kira Kantor Kelurahan yang mana yang kondusif dipakai ? Kelurahan Sumberrejo	3. Seandainya ada penggabungan Kelurahan, Kira - Kira Kantor Kelurahan yang mana yang kondusif dipakai ? Kelurahan Sumberrejo
4. Kesimpulan dan Saran dari pelaksanaan Penggabungan Kelurahan yang dipakai ? Untuk personil dipenuhi	4. Kesimpulan dan Saran dari pelaksanaan Penggabungan Kelurahan yang dipakai ? di Sumberrejo Kantornya lebih baik dan strategis (kantornya terletak di antara Tambakdono dan Sumberrejo

4.6. Kelurahan Sukolilo dan Komplek Kenjeran

4.6.1. Batas Wilayah Kelurahan

Tabel 4.32
Batas Wilayah Kelurahan Sukolilo dan Komplek Kenjeran

Batas Kelurahan	Kel. Sukolilo	Kel. Komplek Kenjeran
Utara	Kel : Kenjeran Kec : Kenjeran / Laut	Kel : Kenjeran Kec : Bulak
Timur	Kel : Laut Kec : Laut	Kel : Sukolilo Kec : Bulak
Selatan	Kel : Dukuh Sutorejo Kec : Mulyorejo	Kel : Dukuh Sutorejo Kec : Mulyorejo
Barat	Kel : Komplek Kenjeran Kec : Bulak	Kel : Gading Kec : Tambak Sari

Komplek Kenjeran memiliki luas wilayah 190 ha dengan 26 RT dan 4 RW, sedangkan luas wilayah Kelurahan Sukolilo 78,79 ha dengan 19 Rt dan 3 RW. Jumlah penduduk Kelurahan Komplek Kenjeran lebih banyak dari pada jumlah penduduk Kelurahan Sukolilo yakni 6.808 jiwa sedangkan penduduk Kelurahan Sukolilo sebanyak 4.916 jiwa.

Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Komplek Kenjeran adalah sebagian besar lulusan SLTA (2.259 jiwa), lulusan SD/ sederajat (1.569 jiwa) dan cukup banyak juga penduduk yang berpendidikan tamat S1 yakni sejumlah 1.470 jiwa. Hal ini berbanding terbalik cukup tajam dengan penduduk Kelurahan Sukolilo, dimana rata-rata penduduk adalah tamatan SD/ sederajat. Penduduk Kelurahan Sukolilo yang berpendidikan tamat SLTA pun hanya tercatat sejumlah 599 Jiwa lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk lulusan SLTP yakni 691 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk tamatan S1 tercatat hanya 31 jiwa.



Tabel 4.33
Tingkat Pendidikan Penduduk
Kelurahan Sukolilo dan Kelurahan Komplek Kenjeran

NO	Keterangan	Kel. Sukolilo	Kel. Komplek Kenjeran
		Jumlah	Jumlah
1	Penduduk tamat SLTP/Sederajat	691 orang	880 orang
2	Penduduk tamat SLTA/Sederajat	599 orang	2.259 orang
3	Penduduk tamat SD/Sederajat	1.167 orang	1.569 orang
4	Penduduk tamat S-3	orang	orang
5	Penduduk tamat S-2	3 orang	38 orang
6	Penduduk tamat S-1	31 orang	1.470 orang
7	Penduduk tamat D-3	95 orang	orang
8	Penduduk tamat D-2	220 orang	orang
9	Penduduk tamat D-1	347 orang	orang
	Jumlah	3.153 orang	6.216 orang

Kualitas angkatan kerja Kelurahan Komplek Kenjeran dan Sukolilo jauh berbeda. Angkatan kerja Kelurahan Sukolilo sebagian besar adalah tamatan SD/ sederajat. Sedangkan di Komplek Kenjeran kualitas angkatan kerja cukup baik yakni sebanyak 1.470 jiwa adalah lulusan perguruan tinggi dan sebanyak 2.259 jiwa merupakan lulusan SLTA/ Sederajat.

Tabel 4.34
Kualitas Angkatan Kerja
Kelurahan Sukolilo dan Kelurahan Komplek Kenjeran

No	Keterangan	Kel. Sukolilo	Kel. Komplek Kenjeran
		Uraian	Uraian
1	Jumlah angkatan kerja tidak tamat SD/ Sederajat	853 Orang	Orang
2	Jumlah angkatan kerja tamat SLTP/ Sederajat	696.Orang	Orang
3	Jumlah angkatan kerja tamat SLTA/ Sederajat	378 Orang	2.259 Orang
4	Jumlah angkatan kerja tamat SD/ Sederajat	1.198 Orang	Orang
5	Jumlah angkatan kerja tamat Perguruan Tinggi	6 Orang	1.470 Orang
6	Jumlah angkatan kerja tamat Diploma	22 Orang	Orang
	Jumlah	3.153 Orang	3.729 Orang

4.6.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Kelurahan Sukolilo dan Komplek kenjeran memiliki sarana pendidikan berupa SD dan SLTP, yakni masing masing 2 unit SLTP dan SD di Kelurahan Sukolilo dan 1 unit SLTP, 1 unit SD di Kelurahan Komplek Kenjeran. Sedangkan kepemilikan sarana ekonomi oleh dua kelurahan cukup lengkap dan dalam kondisi baik. Lihat tabel berikut ini.

Tabel 4.35
Sarana Pendidikan Kelurahan Sukolilo dan Kelurahan Komplek Kenjeran

No	Jenis Prasarana	Kel. Sukolilo	Kel. Komplek Kenjeran
		Ada / Tidak	Ada / Tidak
1	Taman kanak-kanak (TK)	tidak (-)	tidak (-)
2	SLTA/Sederajat	tidak (-)	Ada (1)
3	SLTP / Sederajat	Ada (2)	Ada (4)
3	SD/Sederajat	Ada (2)	Ada (1)
	Jumlah	4	6

Tabel 4.36
Prasarana Ekonomi Kelurahan Sukolilo dan Kelurahan Komplek Kenjeran

No	Jenis Prasarana	Kel. Sukolilo		Kel. Komplek Kenjeran	
		Keterangan		Keterangan	
		Ada / Tidak	Baik / Rusak	Ada / Tidak	Baik / Rusak
1	Balai Desa/ Kantor Kelurahan	Ada (1)	Baik	-	-
2	Meja	Ada (11)	Baik	Ada (13)	Baik / Rusak
3	Kursi	Ada (70)	Baik	Ada (70)	Baik / Rusak
4	Mesin Tik	Ada (4)	Rusak	Ada (3)	Rusak
5	Kalkulator	-	Baik	-	-
6	Lemari Arsip	Ada (5)	Baik	Ada (4)	Baik
7	Papan Penyajian Data	Ada (2)	Baik	Ada 1	Baik / Rusak
8	Ruang Lurah	Ada (1)	Baik	Ada (1)	Baik / Rusak
9	Ruang Sekretaris Desa	Ada (1)	Baik	Ada (1)	Baik / Rusak

10	Ruang LKMD/Sabutan Lain	Ada (1)	Baik	-	-
11	Ruang PKK	-	Baik	Ada (1)	Baik
12	Ruang Rapat	Ada (1)	Baik	Ada (1)	Baik
13	Ruang Pelayanan	Ada (1)	Baik	Ada (1)	Baik
	Jumlah				

4.6.3. Pelayanan Masyarakat

Berikut ini komparasi pelayanan masyarakat dari kedua kelurahan, dilihat dari 4 klausul.

Tabel 4.37
Pelayanan Masyarakat Kelurahan Sukolilo dan Kelurahan Komplek Kenjeran

Kelurahan Sukolilo	Kelurahan Komplek Kenjeran
<p>1. Apakah SDM Kelurahan seimbang dengan masyarakat yang dilayani (berdasarkan Rasio Pelayanan Masyarakat) ? Berapa rata-rata pelayanan dalam 1 bulan pada 2 Tahun Terakhir ?</p> <p>a) SDM Personil Kel. Sukolilo sudah seimbang, namun perlu penambahan personil</p> <p>b) Rata-rata pelayanan dalam 1 bulan pada 2 tahun terakhir \pm 150 pelayanan</p>	<p>1. Apakah SDM Kelurahan seimbang dengan masyarakat yang dilayani (berdasarkan Rasio Pelayanan Masyarakat) ? Berapa rata-rata pelayanan dalam 1 bulan pada 2 Tahun Terakhir ?</p> <p>Seimbang</p>
<p>2. Apakah semua keluhan dan keinginan masyarakat terakomodasi dengan jumlah SDM yang ada serta sarana dan prasarana di Kelurahan ?</p> <p>Seharusnya perlu penambahan jumlah SDM Kelurahan, karena selama ini keluhan dan keinginan masyarakat di paksakan terakomodasi, walaupun dengan sarana dan prasarana yang ada.</p>	<p>2. Apakah semua keluhan dan keinginan masyarakat terakomodasi dengan jumlah SDM yang ada serta sarana dan prasarana di Kelurahan ?</p> <p>Terakomodasi</p>

<p>3. Seandainya ada penggabungan Kelurahan, Kira - Kira Kantor Kelurahan yang mana yang kondusif dipakai ?</p> <p>Apabila diadakan penggabungan kelurahan kami, Kel. Sukolilo digabung dengan Kel. Komplek Kenjeran, maka yang kondusif adalah diletakkan di Kantor Kel. Sukolilo, dengan alasan :</p> <p>Kantor Kel. Sukolilo berdiri diatas tanah BTKD, Warga Kel. Sukolilo memiliki ekonomi rata-rata menengah ke bawah, sehingga tingkat partisipasi warga masih bisa mendukung (baik permintaan administrasi pelayanan, keluhan warga, dll) dan transportasi warga nelayan.</p>	<p>3. Seandainya ada penggabungan Kelurahan, Kira - Kira Kantor Kelurahan yang mana yang kondusif dipakai ?</p> <p>lebih baik di Kel. Komplek Kenjeran, karena tempatnya strategis</p>
<p>4. Kesimpulan dan Saran dari pelaksanaan Penggabungan Kelurahan yang dipakai ?</p> <p><u>Kesimpulan :</u> Penggabungan kantor Kel. Sukolilo dan Kel. Komplek Kenjeran lebih berpeluang diletakkan di kantor Kel. Sukolilo, memandang tanah yang ditempati untuk kantor kelurahan adalah tanah BTKD</p> <p><u>Saran</u> Menurut kami, nama kelurahan akan datang adalah : KOMPLEK SUKOLILO yang mana nama 2 kelurahan tetap harus ada sesuai asal dan tidak menghilangkan nama 2 kelurahan tersebut, hanya menghapus kenjeran dan Kelurahan Kenjeran sudah ada.</p>	<p>4. Kesimpulan dan Saran dari pelaksanaan Penggabungan Kelurahan yang dipakai ?</p> <p>Lebih baik di gabung karena lokasi kedua Kelurahan berdekatan dan jumlah penduduk minim.</p>

BAB V PENGGABUNGAN KELURAHAN

5.1. Penentuan Kelurahan Yang Digabungkan

Berdasarkan hasil perhitungan metode skoring seperti yang dijelaskan pada Bab 2 Kajian Pustaka, berdasarkan 3 aspek, yakni jumlah penduduk, luas wilayah dan sarana prasana, Kelurahan Kalianak mendapat skore 12, Kelurahan Genting 10, Kelurahan Tambak Langon 10, Kelurahan Prapen 10, Kelurahan Klakah Rejo 10, dan Kelurahan Tambak Dono 11, termasuk dalam kategori kelurahan yang perlu digabung. Sedangkan Kelurahan Sukolilo mendapat skore 9, skore yang mepet dengan kategori perlu untuk digabungkan. Dari sini, kemudian dipelajari peta wilayah dan potensi yang ada untuk menentukan kelurahan pasangan. Kelurahan pasangan tersebut antara lain Greges dengan skore 8 untuk Tambak Langon, Panjang Jiwo 8 untuk Prapen, Kandangan 5 untuk Klakah Rejo, dan Komplek Kenjeran 8 untuk Sukolilo, dan Sumberrejo 7 untuk Tambak Dono.

5.2. Penentuan Letak Kelurahan Baru dan Nama Kelurahan Baru

Memperhatikan kondisi kelurahan dan asas kemanfaatan dari sarana prasana kelurahan yang ada, mempertimbangkan kapasitas dan potensi kedua kelurahan yang akan digabung (eksisting) : jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah aparatur, potensi pengembangan wilayah, merupakan dasaar-dasar pertimbangan yang digunakan. Diprioritaskan, kelurahan dengan potensi pengembangan lebih kecil untuk bergabung dengan kelurahan dengan potensi pengembangannya lebih besar.






Mempertimbangkan kondisi sarana prasarana yg ada di kedua kelurahan, antara lain: kondisi fisik kantor kelurahan, akses jalan ke/dari kantor kelurahan /instansi lain, ketersediaan fasilitas umum dll. Kantor kelurahan yang baru diprioritaskan berada pada wilayah kelurahan dengan sarana prasarana yang paling strategis untuk saat ini.

Pelaksanaan penggabungan kelurahan sangat perlu memperhatikan aspek sosial, yakni dengan memperhatikan kondisi sosial budaya di masing-masing kelurahan yang akan digabungkan, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul, dan perlu menjangkau aspirasi masyarakat di masing-masing kelurahan yang akan digabungkan terkait dengan (1) opini terhadap rencana penggabungan Kelurahan, (2) ekspektasi atau harapan-harapan terkait rencana penggabungan kelurahan, (3) usulan nama kelurahan baru dan lokasi kelurahan baru.

Berikut komparasi data kelurahan yang akan digabungkan.

5.2.1. Kelurahan Sukolilo dan Komplek Kenjeran

Tabel 5.1
Kondisi Eksisting Kelurahan Sukolilo dan Komplek Kenjeran

No	Uraian	Kelurahan	
		Sukolilo	Komplek Kenjeran
1	Luas wilayah	0,9 Km2	1,4 Km2
2	Jumlah Penduduk	4916 Jiwa	6808 Jiwa
3	Sosial Budaya	Homogen nelayan	Heterogen pegawai
		Karakteristik warga di kedua kelurahan cukup berbeda secara signifikan, merupakan potensi konflik.	
4	Aparat pemerintah	5 Orang	4 Orang
5	Prestasi	-	Memiliki beberapa prestasi
6	Lokasi Kantor Kelurahan	Jl. Sukolilo 7-8	Jl. Wiratno 1
7	Sarana Prasarana	Kantor Kelurahan cukup memadai berikut akses jalannya. Rencana pelebaran jalan akan membuat sukolilo lebih strategis dan berdampak pada aset tanah, harga akan	Kantor Kelurahan memadai, ditunjang dengan berbagai sarana, prasarana dan fasilitas umum yang ada. <ul style="list-style-type: none">  fasilitas pendidikan negeri dan swasta  fasilitas peribadatan  fasilitas olahraga

		naik	<ul style="list-style-type: none"> 📄 fasilitas gedung pertemuan 📄 terdapat kantorBUMN, Kantor Pos dan PLN 📄 penataan lingkungan teratur dengan sanitasi yang baik 📄 Masih punya lahan kosong yang direncanakan untuk perumahan
		Perlu ditentukan lokasi kantor kelurahan yang baru, yang mana di usulkan lokasi baru berada di Komplek Kenjeran berdasarkan pertimbangan sarana prasarana yang memadai.	
8	Ikatan Emosional Terhadap Nama	Punya ikatan emosional terkait penggunaan nama	Tidak memiliki ikatan emosional dengan nama
9	Toponimi/ Sejarah Nama Kelurahan	Toponimi Sukolilo = Sukarela	Tidak ada. nama yang digunakan menunjuk pada wilayah TNI AL
10	Masukan Masyarakat	Penggunaan nama Sukolilo Lebih diutamakan.	Tidak ada resistensi untuk penggabungan nama
11	Kaidah Bahasa untuk Penamaan	Penggunaan nama Sukolilo, memenuhi kaidah pembakuan nama	
12	Usulan Nama Baru	Diusulkan nama baru adalah Kelurahan Sukolilo Baru, untuk asimilasi budaya karena penggunaan nama komplek memiliki kesan eksklusivitas kewilayahan.	

Diketahui luas wilayah Komplek Kenjeran memiliki luas wilayah yang lebih besar dibandingkan dengan Sukolilo, demikian juga dengan jumlah penduduknya. Ketersediaan sarana dan prasarana di Komplek Kenjeranpun lebih memadai yakni terdapat:

- fasilitas pendidikan negeri dan swasta
- fasilitas peribadatan
- fasilitas olahraga
- fasilitas gedung pertemuan
- terdapat kantor BUMN, Kantor Pos dan PLN
- penataan lingkungan teratur dengan sanitasi yang baik, dan
- Masih punya lahan kosong yang direncanakan untuk perumahan

Dari ketiga faktor ini (luas wilayah, jumlah penduduk, dan ketersediaan sarana prasarana, penentuan pusat pemerintahan baru atau **kelurahan baru layak nya di Komplek Kenjeran** Dengan demikian implikasi dari penggabungan Kelurahan Komplek Kenjeran dan Sukolilo adalah memiliki luas wilayah 2,3 km² dengan 9 orang aparatur pemerintahan yang akan bertanggungjawab melayani 16640 jiwa penduduk. Artinya 1 orang aparat melayani 1849 orang.

Untuk kondisi sosial budaya dari penggabungan dua kelurahan ini dapat dikatakan significant berbeda, penduduk memiliki jenis pekerjaan yang heterogen dengan kualitas tenaga kerja yang berbeda pula. Perbedaan budaya yakni karakter warga sukolilo yang cenderung "santai" dan warga Komplek Kenjeran yang cenderung disiplin dipandang oleh tokoh masyarakat setempat dapat menimbulkan konflik. Namun sisi positif yang dapat diambil dengan pusat pemerintahan kelurahan yang diletakkan pada Komplek Kenjeran adalah kemungkinan menularnya karakter-karakter disiplin warga Komplek Kenjeran ke warga Sukolilo.

Penentuan nama baru yang disarankan adalah **Kelurahan Sukolilo Baru**. Berdasar pertimbangan topomimi atau kesejarahan nama. Dengan demikian secara administratif, warga Komplek Kenjeran ikut Kelurahan Sukolilo sesuai penamaan baru walaupun letak kantor berada di Kantor Kelurahan Komplek Kenjeran. Beberapa masukan dari hasil pelaksanaan diskusi adalah pertimbangan lain yang menjadi fokus penentuan letak pusat pemerintahan baru atau kelurahan baru agar terletak di Komplek Kenjeran adalah status kepemilikan tanah dan bangunan kantor kelurahan, Dimana status kantor Kelurahan Komplek Kenjeran saat ini adalah milik TNI AL. Disisi lain Kantor Kelurahan Sukolilo adalah asset Pemerintah Kota Surabaya sendiri.

5.2.2. Kelurahan Kalianak dan Genting

Tabel 5.2
Kondisi Eksisting Kelurahan Kalianak dan Genting

No	Uraian	Kelurahan	
		Kalianak	Genting
1	Luas wilayah	202.092 Ha	133.750 Ha
2	Jumlah Penduduk	1739 Jiwa	5587 Jiwa
3	Sosial Budaya	Homogen Pegawai swasta Karakteristik warga di kedua kelurahan tidak memiliki perbedaan secara significant.	Heterogen Pegawai formal, swasta dan buruh
4	Aparat pemerintah	5 Orang	3 Orang
5	Prestasi	-	Memenangkan beberapa award
6	Lokasi Kantor Kelurahan	Jl. Kalianak Barat 66	Jl. Genting IV/19 Surabaya
7	Sarana Prasarana	Kantor Kelurahan cukup memadai berikut akses jalannya. Perlu disepakati letak kantor Kelurahan yang baru. Diusulkan, letak kantor Kelurahan baru di Kelurahan Kalianak berdasarkan pertimbangan akses jalan. Catatan : Perlu jaminan penyelesaian permasalahan pelayanan kelurahan di Kel.Kalianak.	Kantor Kelurahan cukup memadai. Namun tidak diikuti oleh akses jalan, karena letaknya di dalam gang.
8	Ikatan Emosional Terhadap Nama	Punya ikatan emosional terkait penggunaan nama	Punya ikatan emosional terkait penggunaan nama
9	Toponimi/ Sejarah Nama Kelurahan	Merasa keberadaan wilayah lebih tua	Merasa keberadaan wilayah lebih tua. Punya sejarah parikan dan ludruk
10	Masukan Masyarakat	Ada resistensi untuk penggabungan nama	Ada resistensi untuk penggabungan nama
11	Kaidah Bahasa untuk Penamaan	Penggunaan nama Genting, memenuhi kaidah penamaan baru	
12	Usulan Nama Baru	Diusulkan nama baru adalah Kelurahan Genting Kalianak, berdasarkan kapasitas kelurahan	

Luas wilayah Kelurahan Kalianak lebih besar dari pada luas wilayah Kelurahan Genting, namun Kelurahan Genting memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih banyak. Kalianak tidak memiliki sarana Pendidikan maupun kesehatan sedang Genting memiliki sarana pendidikan (7 unit), kesehatan (4 unit) dan ekonomi yang lebih memadai. Secara administrative harusnya warga Kalianak bergabung ke Genting. Untuk letak kantor kelurahan baru dipertimbangkan berdasar akses jalan ke Kantor Kelurahan Genting, itu tidak strategis yakni berada di dalam gang kecil. Sehingga disarankan **letak kantor kelurahan baru di Kalianak**. Hambatannya adalah adanya resistensi dari warga Kalianak untuk bergabung ke Kelurahan Genting dimana secara sosiologis hal ini dikarenakan ikatan emosional warga terhadap wilayahnya dan faktor political will dari pihak yang berkepentingan. Disamping itu adanya salah persepsi bahwa penggabungan kelurahan berarti penghapusan salah satu wilayah.

Implikasi dari penggabungan kedua kelurahan ini adalah luas wilayah menjadi 335.842 Ha dengan tanggungjawab melayani 7325 jiwa penduduk. Dengan jumlah aparat 8 orang artinya setiap aparat melayani 915 orang. Kondisi sosial budaya warga kedua kelurahan tidak memiliki perbedaan secara significant dan sifatnya adalah heterogen yakni pegawai formal, swasta dan buruh.

Kedua warga kelurahan sama-sama bersikukuh mempertahankan nama kelurahannya karena adanya ikatan emosional terhadap nama. Namun karena letak kantor kelurahan baru di sarankan di Kalianak, maka penentuan **nama baru kelurahan yang disarankan adalah Kelurahan Genting Kalianak**. Hal ini berdasarkan asas keadilan. Warga Kalianak tidak akan merasa kehilangan (karena kantor kelurahan baru tetap di wilayahnya) dan warga genting tidak akan merasa kehilangan nama (karena nama Genting digunakan untuk nama kelurahan). Dilihat dari penelusuran nama-nama jalan besar di kedua wilayah kelurahanpun nama Genting dan Kalianak akan tetap ada dan tidak berubah dengan adanya penggabungan, sehingga tidak ada penghapusan kesejarahan nama seperti yang ditakutkan warga. Hanya saja, secara administratif yang berubah adalah warga Kalianak ikut Kelurahan Genting.



5.2.3. Kelurahan Tambak Langon dan Greges

Tabel 5.3
Kondisi Eksisting Kelurahan Tambak Langon dan Greges

No	Uraian	Kelurahan	
		Tambak Langon	Greges
1	Luas wilayah	277,71 Ha	418,577 Ha
2	Jumlah Penduduk	2.211 Jiwa	4.729 Jiwa
3	Sosial Budaya	Homogen Nelayan buruh tani, dan buruh pabrik	Homogen 70% petani dan petani tambak
		Karakteristik warga di kedua kelurahan tidak memiliki perbedaan secara signifikan.	
4	Aparat pemerintah	4 Orang	5 Orang
5	Prestasi	-	-
6	Lokasi Kantor Kelurahan	Jl. Tambak Langon 45	Jl. Greges Barat Gg. Lebar No. 4
7	Sarana Prasarana	Kantor Kelurahan cukup memadai berikut akses jalannya.	Kantor Kelurahan cukup memadai berikut akses jalannya
		Perlu disepakati letak kantor Kelurahan yang baru, sesuai dengan kondisi yang memenuhi syarat. Diusulkan kantor kelurahan di Jalan Tambak Langon.	
8	Ikatan Emosional Terhadap Nama	Punya ikatan emosional terkait penggunaan nama	Punya ikatan emosional terkait penggunaan nama
9	Toponimi/ Sejarah Nama Kelurahan	Tidak ada	Ada sejarah penamaan. Greges, tiga tokoh masyarakat dari daerah tersebut meninggal karena sakit greges.
10	Masukan Masyarakat	Ada resistensi untuk penggabungan nama	Ada resistensi untuk penggabungan nama. Penggunaan nama Greges lebih diutamakan
11	Kaidah Bahasa untuk Penamaan	Penggunaan nama Greges, memenuhi kaidah penamaan baru	
12	Usulan Nama Baru	Diusulkan nama baru adalah Kelurahan Tambak Sarioso, berdasarkan kapasitas kelurahan	



Luas wilayah Kelurahan Greges lebih besar jika dibandingkan dengan luas wilayah Kelurahan Tambak Langon, demikian juga dengan jumlah penduduk. Greges memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak. Dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana kedua kelurahan memiliki point yang sama, dalam artian sama-sama memiliki sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang memadai, termasuk kelayakan kondisi kantor kelurahan.

Namun dengan memperhatikan kesejarahan nama dan topinimi yang ada Greges memenuhi kaidah penamaan baru sehingga **disarankan nama kelurahan baru adalah Tambak Sarioso**. Dengan penggunaan nama kelurahan baru yakni Greges maka asas keadilan dapat digunakan sebagai dasar penentuan **letak kantor baru, kelurahan yakni di Tambak Langon**. Sehingga warga tidak merasa kehilangan atau terhapus wilayahnya. Secara adminidtratif, warga Greges ikut Kelurahan Tambak Langon.

Implikasi dari penggabungan kedua wilayah ini adalah keluraha baru akan memiliki luas wilayah sebesar 696,287 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 6940 jiwa. Artinya dengan jumlah aparatur sebanyak 9 orang, setiap aparat melayani 771 orang. Kondisi sosial budaya masyarakat yang significant tidak berbeda, yakni masyarakat dengan struktur mata pencaharian buruh dan petani tambak.

5.2.4. Kelurahan Kandangan dan Klakah Rejo

Tabel 5.4
Kondisi Eksisting Kelurahan Kandangan dan Klakah Rejo

No	Uraian	Kelurahan	
		Kandangan	Klakah Rejo
1	Luas wilayah	3,4 Km2	0,7 Km2
2	Jumlah Penduduk	13279 jiwa	4928 jiwa
3	Sosial Budaya	Heterogen	Homogen
		Karakteristik warga di kedua kelurahan tidak memiliki perbedaan secara signnificant.	
4	Aparat pemerintah	5 orang	5 orang

5	Prestasi	-	-
6	Lokasi Kantor Kelurahan	Jl. Raya Kandangan	Jl. Raya Klakah Rejo
7	Sarana Prasarana	Kantor Kelurahan cukup memadai berikut akses jalannya. Disepakati letak kantor Kelurahan yang baru terletak di Kandangan.	Kantor Kelurahan cukup memadai berikut akses jalannya
8	Ikatan Emosional Terhadap Nama	Punya ikatan emosional terkait penggunaan nama	Punya ikatan emosional terkait penggunaan nama
9	Toponimi/ Sejarah Nama Kelurahan	Dahulunya wilayah kandangan merupakan wilayah yang memiliki jumlah kandang yang banyak	Tidak ada
10	Masukan Masyarakat	Tidak ada resistensi untuk penggabungan nama. Penggunaan nama Kandangan lebih diutamakan	Tidak ada resistensi untuk penggabungan nama
11	Kaidah Bahasa untuk Penamaan	Penggunaan nama Kandangan, memenuhi kaidah penamaan baru	
12	Usulan Nama Baru	Diusulkan nama baru adalah Kelurahan Kandangan, berdasarkan nilai historisnya	

Kelurahan Kandangan memiliki luas wilayah yang lebih besar dan jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan Kelurahan Klakah Rejo. Dilihat dari ketersediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi, keduanya memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sehingga secara ketentuan Klakah Rejo ikut Kelurahan Kandangan. Sehingga **disarankan letak kantor kelurahan baru di Kandangan**. Hal ini dipermudah juga dengan tidak adanya resistensi dari kedua belah warga dengan adanya rencana penggabungan.

Penentuan nama baru kelurahan, warga Kandangan dan Klakah rejo sama-sama memiliki ikatan emosional dengan kesejarahan nama, namun kesejarahan nama Kandangan tercatat secara toponimi sebagai wilayah yang dulunya merupakan wilayah dengan banyak kandang sehingga dinamakan Kandangan. Untuk itu, nama Kandangan memenuhi kaidah pembentukan nama baru, sehingga **nama kelurahan baru yang disarankan adalah Kandangan**.

Implikasi dari penggabungan dua kelurahan ini adalah luas wilayah yang menjadi 4,1 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 18207 jiwa. Dengan jumlah aparat sebanyak 10 orang maka setiap aparat melayani 1821 orang. Kondisi sosial budaya heterogen dengan status mata pencaharian penduduk rata-rata adalah pegawai formal dan pegawai swasta.

5.2.5. Kelurahan Prapen dan Panjang Jiwo

Tabel 5.5
Kondisi Eksisting Kelurahan Prapen dan Panjang Jiwo

No	Uraian	Kelurahan	
		Prapen	Panjang Jiwo
1	Luas wilayah	0,4 km ²	0,8 Km ²
2	Jumlah Penduduk	3233 Jiwa	10052 Jiwa
3	Sosial Budaya	Heterogen	Heterogen
		Karakteristik warga di kedua kelurahan tidak memiliki perbedaan secara signifikan.	
4	Aparat pemerintah	4 orang	7 orang
5	Prestasi	-	-
6	Lokasi Kantor Kelurahan	Jl. Prapen Indah Blok AE No. 1	Jl. Panjang Jiwo Permai No.1
7	Sarana Prasarana	Kantor Kelurahan cukup memadai berikut akses jalannya.	Kantor Kelurahan cukup memadai.
		Diusulkan Kantor Kelurahan baru di Kelurahan Prapen berdasarkan pertimbangan akses jalan dan lokasi yang berdekatan dengan kantor kecamatan	
8	Ikatan Emosional Terhadap Nama	Tidak punya ikatan emosional terkait penggunaan nama	Punya ikatan emosional terkait penggunaan nama
9	Toponimi/ Sejarah Nama Kelurahan	Tidak ada	Terdapat nilai sejarah dari nama Panjang Jiwo. Yang merujuk pada seorang tokoh, Mbah Panjang
10	Masukan Masyarakat	Tidak ada resistensi untuk penggabungan nama.	Penggunaan nama Panjang Jiwo lebih diutamakan
11	Kaidah Bahasa untuk Penamaan	Penggunaan nama Panjang Jiwo, memenuhi kaidah penamaan baru	
12	Usulan Nama Baru	Diusulkan nama baru adalah Kelurahan Panjang Jiwo, berdasarkan nilai historisnya	

Luas wilayah panjang Jiwo sedikit lebih besar dibandingkan dengan Prapen. Namun jumlah penduduk sangat timpang, yang mana jauh lebih banyak penduduk Panjang Jiwo. Sarana pendidikan di Panjang Jiwo cukup memadai yakni 4 unit taman kanak-kanak, 5 unit SD, 1 unit SLTP dan 1 unit SLTA. Sedang Prapen memiliki masing masing 1 unit. Namun sarana Prapen memiliki sarana kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu masing-masing 1, dimana Panjang Jiwo tercatat tidak memiliki sarana kesehatan. Dan jika dilihat dari sarana ekonomi, Panjang Jiwo memiliki sarana ekonomi yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan ini, Kelurahan Panjang Jiwo sangat layak dipertimbangkan menjadi pusat pemerintahan kelurahan baru hasil penggabungan. Akan tetapi, dilihat dari akses jalan dan letak Kecamatan Tenggilis Mejoyo yang lebih dekat dengan kelurahan Prapen, maka atas dasar asas keefektifan, **disarankan letak kantor kelurahan baru adalah di Kelurahan Prapen.**

Penggunaan nama baru kelurahan yang disarankan adalah Kelurahan Panjang Jiwo, dengan alasan bahwa warga Panjang Jiwo memiliki ikatan emosional dengan sejarah nama dan juga Panjang Jiwo terdapat toponiminya, yang mana merujuk pada nama seorang tokoh yakni Mbah Panjang.

Implikasi dari penggabungan kedua kelurahan ini adalah luas wilayah menjadi 1,2 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 13.285 jiwa. Jumlah aparatur yang menjadi 11 orang artinya setiap aparat melayani 1208 orang. Kondisi sosial budaya masyarakatnya sangat heterogen, mulai dari kualitas tenaga kerja hingga status mata pencaharian penduduk. Secara administratif, warga Prapen ikut Panjang Jiwo.

5.2.6. Kelurahan Sumberrejo dan Tambak Dono

Tabel 5.6
Kondisi Eksisting Kelurahan Sumberrejo dan Tambak Dono

No	Uraian	Kelurahan	
		Sumberrejo	Tambakdono
1	Luas wilayah	3,7 Km ²	3,2 Km ²
2	Jumlah Penduduk	7753 Jiwa	2229 Jiwa
3	Sosial Budaya	Heterogen	Heterogen industri, jasa perdagangan
		Relatif tidak ada masalah yang mendasar.	
4	Aparat pemerintah	7 orang	5 orang
5	Prestasi	-	-
6	Lokasi Kantor Kelurahan	Jl.Raya Sumberrejo Surabaya	Jl. Raya Tambak Dono Surabaya
7	Sarana Prasarana	Kantor Kelurahan cukup memadai berikut akses jalannya	Kantor Kelurahan cukup memadai.
		Disepakati letak kantor Kelurahan yang baru terletak di Sumberrejo, berdasarkan perimbangan jumlah penduduk dan sarana prasarana yang memadai.Hambatannya, tidak ada jalan akses langsung yang menghubungkan kedua kelurahan, harus melewati jalan besar.	
8	Ikatan Emosional Terhadap Nama	Punya ikatan emosional terkait penggunaan nama	Punya ikatan emosional terkait penggunaan nama
9	Toponimi/ Sejarah Nama Kelurahan	Terdapat sejarah nama. Sumberrejo= Sumbernya biar rejo	Terdapat sejarah nama. Tambak Dono = Tambaknya biar dono
10	Masukan Masyarakat	Ada resistensi untuk penggabungan nama	Ada resistensi untuk penggabungan nama
11	Kaidah Bahasa untuk Penamaan	Penggunaan nama Sumberrejo, memenuhi kaidah penamaan baru	
12	Usulan Nama Baru	Diusulkan nama Kelurahan baru adalah Sumber Rejo. Dengan pertimbangan kewilayahan	

Sumberrejo memiliki luas wilayah yang lebih besar dibandingkan dengan Tambak Dono. Demikian juga dengan jumlah penduduknya, Sumberrejo memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dari pada Tambak Dono. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan ekonomi di Sumberrejo juga tercatat cukup memadai dan dalam kondisi baik. Sumberrejo memiliki 8 taman kanak-kanak dan 4 SD sedangkan Tambak Dono memiliki 2 taman kanak-kanak dan 2 SD. Sumberrejo dan Tambak Dono sama-sama memiliki letak kantor kelurahan yang ditunjang dengan akses yang baik. Secara ketentuan penggabungan wilayah, warga Tambak Dono ikut ke Sumberrejo. Selain itu, baik Sumberrejo dan Tambak Dono memiliki kesejarahan nama dan toponimi serta warga memiliki ikatan emosional terhadap nama. Sehingga berdasarkan pertimbangan kewilayahan, jumlah penduduk dan sarana prasarana **disarankan letak kantor kelurahan dan nama baru kelurahan adalah Sumber Rejo.**

Implikasi dari penggabungan Sumberrejo dan Tambak Dono adalah luas wilayah menjadi 6,9 Km² dan jumlah penduduk menjadi 9982 jiwa. Kondisi sosial budaya masyarakat adalah heterogen dilihat dari kualitas tenaga kerja dan status mata pencaharian yakni petambak dan pekerja sector industri jasa. Secara administratif, warga Tambak Dono ikut Sumberrejo.

BAB VI PENUTUP

6.1. Penutup

Demikian Laporan Akhir ini dibuat guna memberikan deskripsi pelaksanaan rancana penggabungan Kelurahan di Kota Surabaya. Dapat diuraikan secara singkat di sini bahwa penggabungan Kelurahan dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat disamping dampak efisiensi yang akan diperoleh. Untuk data pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pula kajian pustaka yang melingkupi (a) deskripsi kelurahan, mulai dari proses pembentukannya hingga contoh layanan yang diberikan kepada masyarakat. (b) dasar-dasar pelaksanaan penggabungan Kelurahan. Laporan ini juga memuat metode pelaksanaan kegiatan, dimana FGD adalah proses pengumpulan data yang digunakan.

6.2. Kesimpulan

Hasil dari kajian ini antara lain menyarankan:

- a. Penggabungan Kelurahan Sukolilo dan Komplek Kenjeran: kantor kelurahan terletak di Komplek Kenjeran dengan nama kelurahan baru, Sukolilo Baru. Secara administratif warga Komplek Kenjeran ikut Sukolilo sesuai penamaan baru.
- b. Penggabungan Kelurahan Kalianak dan Genting: kantor kelurahan terletak di Kalianak dengan nama kelurahan baru, Genting Kalianak. Secara administratif warga Kalianak ikut Genting sesuai dengan penamaan baru.

- c. Penggabungan Kelurahan Greges dan Tambak Langon: kantor kelurahan terletak di Tambak Langon dengan nama kelurahan baru, Tambak Sarioso. Secara administratif warga Tambak Langon ikut Greges sesuai dengan penamaan baru.
- d. Penggabungan Kelurahan Kandangan dan Klakah Rejo: kantor kelurahan terletak di Kandangan dengan nama kelurahan baru, Kandangan. Secara administratif warga Klakah Rejo ikut Kandangan sesuai dengan penamaan baru.
- e. Penggabungan Kelurahan Prapen dan Panjang Jiwo: kantor kelurahan terletak di Prapen dengan nama kelurahan baru, Panjang Jiwo. Secara administratif warga Prapen ikut Panjang Jiwo, sesuai dengan penamaan baru.
- f. Penggabungan Kelurahan Sumberrejo dan Tambak Dono: kantor kelurahan terletak di Sumberrejo dengan nama kelurahanbaru, Sumber Rejo. Secara administratif warga Tambak Dono ikut Sumberrejo sesuai dengan penamaan baru.